

**KONSEP NEGARA DAN KEPEMIMPINAN IMAMAH MENURUT JEMAAH
AN NADZIR
(Studi Kasus di Mawang Kec. Somba Opu Kab. Gowa)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Oleh:

AHMAD MAULANA
NIM: 10300113029

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN KETATANEGARAAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Maulana
NIM : 10300113029
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang/26 Mei 1995
Jur/Prodi/Konsentrasi : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Fakultas/Program : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Jl.Paccinang Raya IV no.85 Tello Baru Kec.Panakkukkang
Makassar
Judul : Konsep Negara dan Kepemimpinan Imamah Menurut Jemaah
An Nadzir (Studi Kasus di Mawang Kec. Somba Opu Kab.
Gowa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
MAKASSAR

Makassar, 24 Agustus 2017

Penyusun



Ahmad Maulana
NIM: 10300113029

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Konsep Negara dan Kepemimpinan Imamah Menurut Jemaah An Nadzir (Studi Kasus di Mawang Kec. Somba Opu Kab. Gowa)”, yang disusun oleh Ahmad Maulana, NIM: 10300113029, mahasiswa jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 6 Dzulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (dengan beberapa perbaikan).*

Makassar, 29 Agustus 2017 M
7 Dzulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag	(.....)
Munaqisy I	: Prof. Dr. Darussalam, M. Ag	(.....)
Munaqisy II	: Drs. H. M. Gazali Sayuti, M. Hi	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Abdillah Mustari, M. Ag	(.....)

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. Darussalam, M. Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan Kasih dan Sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Konsep Negara dan Kepemimpinan Imamah Menurut Jemaah An Nadzir (studi Kasus di Mawang Kec. Somba Opu Kab. Gowa)**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad saw beserta ahlul baitnya yang suci. Beliau adalah hamba Allah swt. yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada seluruh alam, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahatan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliaulah, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua yang sangat saya hormati dan cintai, Bapak Zaid Buri Indiardjo dan Ibunda tercinta dan tersayang Santy Guricci, yang telah memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa, semoga Allah swt melimpahkan Ridho dan Kasih-Nya kepada keduanya. Sebagaimana mereka telah mendidik sejak kecil, yang atas asuhannya, limpahan kasih sayangnya serta motivasi dan dorongan mereka, semoga memperoleh kekuatan material dan moril dalam merintis kerasnya kehidupan. Saudari tercinta Nurwahyuni Indiardjo dan Andi Ayu yang selalu menjadi alasan untuk cepat menyelesaikan studi, yang selalu memberikan kebahagiaan tersendiri dalam keluarga.
2. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Ag selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Beserta seluruh Civitas Akademik atas bantuannya selama mengikuti pendidikan.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar atas segala motivasi yang telah diberikan kepada mahasiswa.
4. Ibu Dra. Nila Sastrawaty, M.Si Selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan serta Ibu Dr. Kurniati., S. Ag., M. Hi selaku Sekretaris Jurusan yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran maupun masukan.
5. Bapak Prof. Dr. Sabri Samin, M. Ag dan Dr. Abdillah Mustari, M. Ag selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Serta Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M. Ag dan Bapak Drs. H. M. Gazali Suyuti, M. Hi selaku penguji.

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah mencurahkan tenaga, pikiran serta waktunya untuk membimbing dan memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada mahasiswa.
7. Bapak Ambo dan Ibu Ida yang telah menjadi orang tua ke-2 yang memberikan kasih sayang dan perhatiannya serta banyak berjasa selama saya kuliah. Selain itu Fira Yuniar yang selalu setia menemani dan menjaga serta memberikan dukungan dan motivasinya.
8. Sahabat sekaligus saudara Andi Muh. Tajrin, Muh. Ikhsan Nur, Nursyam Apriliansyah, Muallim Bahar, Parawangsa, Ilhamsyah, Andi Sharfiah Mustari yang telah setia berbagi suka dan duka hingga berjuang menyelesaikan tugas akhir bersama-sama.
9. Teman-teman sejurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, khususnya HPK A yang telah membantu selama perkuliahan sampai sekarang ini, yang namanya tak sempat saya sebutkan satu demi satu.
10. Sahabat, teman sekaligus keluarga Tello Baru yang telah memberikan kesan dan warna tersendiri selama ini. Fafa, Ikram, Fuad, ocha, holis dan rekan seperjuangan Laskar terkhusus kepada Rezki, Hendra, Maharditya, Satria, Novi, Iswal, Raiyan dan Keluarga besar Komunitas Kampung hukum.
11. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

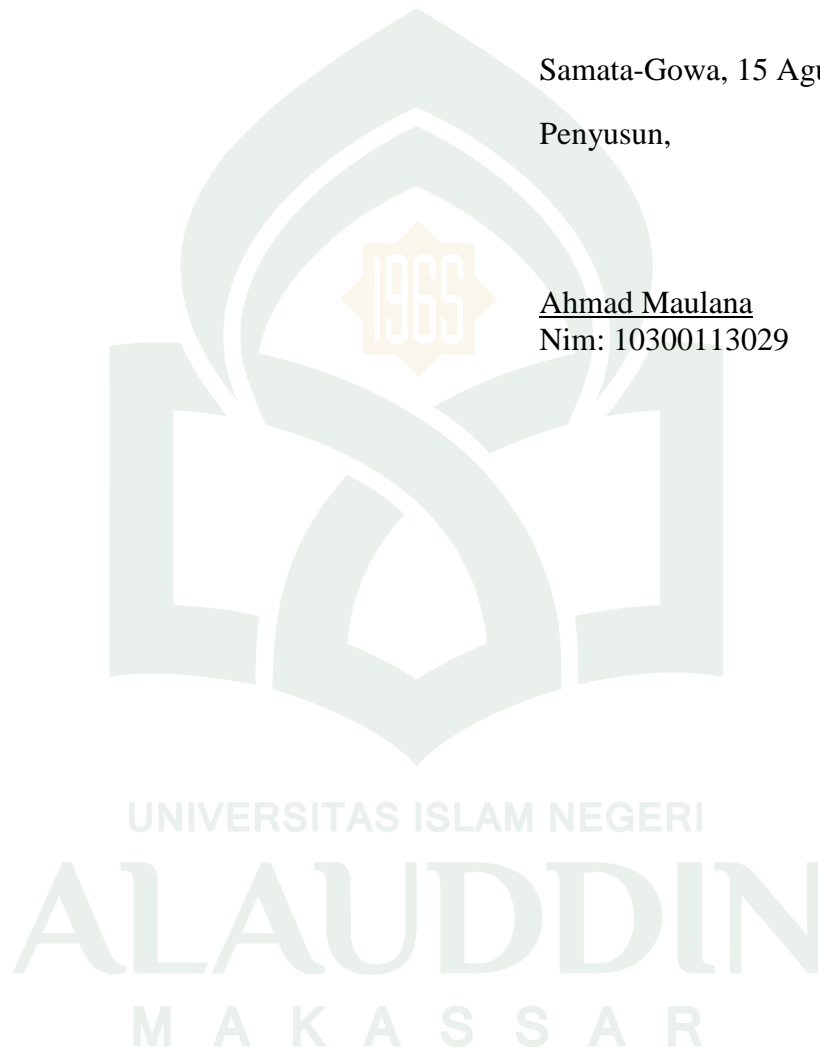
Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah swt, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Aamiin

Samata-Gowa, 15 Agustus 2017

Penyusun,

Ahmad Maulana
Nim: 10300113029



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Deskripsi fokus dan fokus penelitian	4
C. Rumusan masalah	6
D. Kajian Pustaka	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS	9
A. Konsep Negara	9
B. Pemimpin dan kepemimpinan	19
C. Prinsip-prinsip Kepemimpinan	30
D. Konsep Imamah	36
E. Teori Politik Imamah	39
F. Kerangka Konseptual	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Sumber data	46

D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Instrumen Penelitian	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	50
G. Penguji keabsahan data	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Gambar Umum Lokasi Penelitian	52
B. Konsep Negara Menurut Jemaah An-Nadzir	53
C. Konsep Kepemimpinan Imamah Menurut Jemaah An-Nadzir	55
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Implikasi penelitian	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama : Ahmad Maulana
Nim : 10300113029
Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul : Konsep Negara dan Kepemimpinan Imamah Menurut Jemaah An Nadzir (Studi Kasus di Mawang Kec. Somba Opu Kab. Gowa)

Skripsi ini membahas tentang konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An Nadzir. Pembahasannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep negara menurut Jemaah An Nadzir dan konsep kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An Nadzir.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Mawang Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Jenis data diperoleh dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari riset di lapangan dan data sekundernya dikumpulkan melalui *Library research*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa negara menurut Jemaah An Nadzir dibentuk untuk melindungi hak warga negaranya karena hukum yang ada didalamnya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hadirnya negara adalah sebagai alat untuk memaksakan masyarakat untuk mematuhi hukum karena tanpa adanya negara maka masyarakat tidak ingin mematuhi hukum. Dalam hukum Islam, tanpa kehadiran negara sekalipun setiap pemeluk ajaran tersebut pasti akan tunduk dan patuh terhadap segala aturan yang telah ditetapkan dan tidak membutuhkan negara sebagai pemegang kewenangan untuk memaksakan bahkan menggunakan kekerasan agar hukum dapat dipatuhi. Sistem Imamah dalam konteks pemahaman An Nadzir adalah kepemimpinan spiritual dari seorang imam yang dianggap sebagai orang yang dapat menjamin kebenaran bagi para pengikutnya. Oleh karena itu kapasitas personal menjadi indikator utama dalam pergantian kepemimpinan, bukan prosedur formal sebagaimana layaknya organisasi modern.

Maka implikasinya, Permasalahan yang ada dikarenakan pertentangan konsep negara dapat diredam dengan adanya sumbangan pemikiran ini. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Jemaah An Nadzir karena sumbangan pemikiran yang akhirnya memperkaya khazanah pengetahuan Islam di Indonesia dan masyarakat dapat menerima adanya perbedaan pemikiran pada suatu kalangan minoritas dikarenakan kebenaran itu bukan tentang siapa yang berbicara akan tetapi apa yang dibicarakan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam adalah landasan bagi negara, masyarakat dan tata kehidupan ini secara universal, keteraturan dunia menjadi salah satu perangkat menuju kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan terhadap semua masalah kehidupan. Sebagai agama *Rahmatan Lil 'alamin*, Islam sarat akan aturan-aturan hukum yang menjadi acuan manusia dalam menjalani hidup.

Kedatangan Islam sebagai penyempurna syariat sebelumnya, yang dibawah Nabi dan rasul sebelum Muhammad saw. Membuktikan bahwa ajaran Islam komprehensif, lengkap dan memiliki nilai-nilai dasar yang dapat dikembangkan sesuai dengan konteks zaman dan waktu.¹ Didalamnya terdapat sistem politik dan ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem sosial dan sebagainya.

Berdasarkan prinsip-prinsip realitas kenegaraan yang terkandung di dalam Al-Qur'an, Rasulullah saw pernah membangun suatu *Daulah Islamiyah* (negara Islam). Montgomery Watt menyatakan bahwa negara Islam yang dibangun Nabi Muhammad saw itu merupakan suatu negara yang penduduknya terdiri dari percampuran berbagai suku bangsa Arab. Mereka, para suku itu bercampur dengan tujuan untuk mengadakan persekutuan dengan Nabi Muhammad saw. Wilayah kekuasaan Nabi Muhammad saw ini pada mulanya sekitar Mekah dan Madinah saja, yang kemudian setelah melakukan perluasan wilayah, kekuasaanya melebar keseluruh jazirah Arab. Tolak ukur Montgomery Watt, menilai kekuasaan Nabi Muhammad saw sebagai

¹Syamsuddin Rajab, *Syariat Islam dalam Negara Hukum* (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 58.

negara adalah karena telah terdapatnya perangkat-perangkat dasar pemerintahan yang ternyata telah memenuhi persyaratan sebagai suatu negara Modern. Persyaratan pokok tersebut antara lain ; adanya kelompok manusia, adanya ketaatan kepada suatu aturan tertentu, mempunyai wilayah tertentu, mempunyai pemerintahan, memiliki ikatan bersama.²

Kehidupan suatu rakyat dapat berjalan secara teratur dan hubungan sesama manusia berjalan dengan rukun dan damai, maka diangkatlah seorang pemimpin yang diberikan kewenangan untuk mengomandoi pelaksanaan aturan yang telah ditetapkan. Mengingat peranannya yang sangat signifikan, maka dalam Islam pengangkatan seorang pemimpin adalah sesuatu yang sangat urgen. Bahkan jika ada tiga orang muslim melakukan perjalanan jauh, Rasulullah menganjurkan agar salah seorang mereka diangkat sebagai pemimpin, dan inilah merupakan gambaran bahwa sangat dibutuhkannya seorang pemimpin.

Adapun di dalam al-Quran terdapat sejumlah ayat yang mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Di antaranya ayat-ayat tersebut mengajarkan tentang kedudukan manusia di bumi dan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kehidupan kemasyarakatan, salah satunya ialah ketaatan kepada pemimpin.³ Ketaatan kepada pemimpin, dilakukan selama dalam kerangka kebaikan dan bukan sebaliknya, apalagi pemimpin itu dipilih dan ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama.⁴

²Oksep Adhayanto, *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam* Vol. 1, No. 1, 2011), h. 90. fisip.umrah.ac.id/.../JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last_86_1... (Diakses 24 februari 2017, pukul 11.47 Wita).

³Muhammad Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Penerbit Universitas Indonesia: UI press, 1993), h. 4.

⁴Usman Jafar, *Islam dan Politik Dinamika Pemikiran Politik dalam Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 65.

Seorang pemimpin dalam Islam mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, bukan hanya menjadi pengarah dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh manusia. Tetapi ia merupakan khalifah di dunia yang berperan mengomandoi dan mengarahkan umat manusia agar mereka melaksanakan aturan dan hukum Allah.

Dalam konteks Nabi sebagai pemimpin, terdapat dua fungsi: kepemimpinan vertikal dan kepemimpinan horizontal. Karena itu, person yang diyakini sebagai pengganti Nabi, mesti diperjelas apakah ia merupakan pengganti nabi dalam konteks vertical atau horizontal. Meskipun khalifah mempunyai arti luas, namun khalifah telah terbatas pengertiannya dalam terapan yang bersifat sosial, politik, kenegaraan, territorial dan horizontal. Sedangkan Imamah yang juga mempunyai arti luas bahkan mencakup imam shalat dan suami sekalipun, dalam kenyataannya, telah terbatas pengertiannya dalam terapan yang bersifat individual, spiritual, intelektual, universal dan vertikal. Penjelasan ini penting agar tidak mereduksi pengertian kepemimpinan horizontal dan vertikal.⁵

Imamah adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah saw. Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.⁶ Syiah meyakini Imamah sebagai kepemimpinan umat. Karenanya, ia harus dipegang oleh pribadi yang memenuhi syarat-syarat ketat yang tidak bisa disandang oleh pribadi yang tidak suci. Karena itu, Syiah meyakini Ali sebagai pemimpin umat. Sedangkan Sunni meyakini kepemimpinan yang bersifat struktural dengan batas

⁵Tim Ahlulbait Indonesia, *Syiah Menurut Syiah* (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014), h. 346.

⁶Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 45.

territorial sebuah *state* (negara). Karena itu, Sunni tidak menetapkan syarat kesucian bagi pemegangnya.⁷

Dalam memahami konsep Imamah maka penulis butuh untuk menunjukan contoh nyata dari kelompok yang menggunakan konsep Imamah di Indonesia terkhusus di Kabupaten Gowa. An-Nadzir adalah salah satu kelompok di Gowa yang menggunakan konsep Imamah. Kelompok ini bermukim di sekitar Danau Mawang Kecamatan Somba Opu.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam tulisan ini ditetapkan untuk membahas mengenai permasalahan tentang konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut jemaah An-Nadzir. Oleh karena itu penulis mengangkat topik dengan judul: “Konsep Negara dan Kepemimpinan Imamah Menurut Jemaah An-Nadzir (Studi Kasus di Mawang Kec. Somba Opu Kab. Gowa)”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini yaitu Konsep Negara dan Kepemimpinan Imamah Menurut Jemaah An-Nadzir.

1. Fokus Penelitian

- a. Negara
- b. Kepemimpinan
- c. Imamah
- d. Jemaah An-Nadzir

⁷Tim Ahlulbait Indonesia, *Syiah Menurut Syiah* (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014), h. 348.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

a. Negara

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan kata yang telah memiliki imbuhan dan Dasar kata ini adalah pimpin, yang bermakna dibimbing atau dituntun.⁸ Kepemimpinan Adalah sikap pribadi yang memimpin pelaksanaan aktivitas untuk mencapai sebuah tujuan. Adapun pengertian lain adalah merupakan suatu proses yang mempengaruhi aktifitas untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

c. Imamah

Imamah adalah sebuah sistem dan metode untuk memahami kenabian, kemudian ia berubah menjadi warna politis kekuasaan.⁹ Imamah juga berarti konsep kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang imam. Imamah merupakan dimensi kepemimpinan Nabi secara vertikal yang diwariskan kepada Imam Ali, kemudian Imam Hasan, Imam Hussein dan keturunannya hingga sampai kepada Imam Mahdi.

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1471.

⁹Tim Ahlulbait Indonesia, *Syiah Menurut Syiah* (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014), h. 338.

d. Jemaah An-Nadzir

Jemaah An-Nadzir merupakan salah satu majelis atau komunitas yang menerapkan konsep Imamah, mereka mempunyai ciri khas rambut pirang, memakai pakaian dan sorban berwarna hitam. Jemaah An Nadzir pada awalnya mulai berkembang di Indonesia seiring dengan datangnya KH Syamsuri Majid pada tahun 1998 yang telah melakukan perjalanan dakwah ke berbagai daerah di Indonesia termasuk di Sulawesi Selatan, Khususnya di Makassar dan Luwu. Jemaah An Nadzir mulai mengorganisir diri sebagai organisasi pada tanggal 8 Februari 2003 di Jakarta dalam bentuk yayasan An Nadzir.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar Belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Konsep Negara dan Kepemimpinan Imamah Menurut Jemaah An-Nadzir dengan sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep Negara menurut Jemaah An Nadzir?
2. Bagaimana konsep kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An Nadzir?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literatur yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tim Ahlulbait Indonesia dalam bukunya *Syiah menurut Syiah*. Adapun isi bukunya membahas tentang penjelasan keyakinan secara epistemologis. uraian-uraian di dalamnya terfokus pada konsep historis para penganunnya

dengan berbagai kontroversi dan perbedaan antar penganut.¹⁰ Namun dalam buku ini tidak membahas secara terperinci mengenai konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An-Nadzir.

2. Suyuthi Pulungan dalam bukunya *Fiqh Siyasah* membahas mengenai pemahaman mengenai hubungan antara agama dan politik.¹¹ Namun dalam buku ini tidak membahas secara terperinci mengenai konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An-Nadzir.
3. Abuddin Nata dalam bukunya *Masail Al-Fiqhiyah* merupakan kumpulan tulisan dari para pakar hukum Islam Institut Agama Islam (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Namun dalam buku ini tidak membahas secara terperinci mengenai konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An-Nadzir.
4. Syahrir Karim dalam Bukunya *Politik Islam* membahas tentang politik islam mulai dari konsep dasar sampai kepada pembahasan Filsafat. Namun dalam buku ini tidak membahas secara terperinci mengenai konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An-Nadzir.
5. Usman Jafar dalam bukunya *Islam dan Politik* membahas mengenai dinamika pemikiran politik dan Islam. Namun dalam buku ini tidak membahas secara terperinci mengenai konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An-Nadzir.

¹⁰Tim Ahlulbait Indonesia, *Syiah Menurut Syiah* (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014), h. 7.

¹¹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 1.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui konsep negara menurut Jemaah An-Nadzir.
- b. Mengetahui konsep kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An-Nadzir.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoretis

1. Mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan khazanah ilmu pengetahuan yang dapat dipergunakan dan di manfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum Islam khususnya konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An-Nadzir.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi sekaligus sebagai bahan bacaan atau referensi khususnya dalam pendidikan ini sekaligus sebagai bahan pustaka.

b. Kegunaan praktis

1) Dapat memberikan informasi dan mengetahui tentang konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An-Nadzir.

2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pihak yang terkait dalam memahami konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An-Nadzir.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Konsep Negara

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial mengharuskan adanya dua hal yang antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Bahkan adanya yang satu mensyaratkan adanya yang lain. Kedua hal tersebut adalah pemimpin dan yang dipimpin. Pemimpin itu memegang otoritas yang menentukan kebijakan dan menjalankannya di dalam wilayah kepemimpinannya untuk mengantar masyarakat yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Hal ini memposisikan pemimpin pada tempat yang sangat strategis dalam kehidupan suatu masyarakat.¹

Kepemimpinan biasanya berada dengan bentuk negara dan tujuan mendirikan negara adalah untuk melindungi hak warga negara. Dalam melindungi hak warga negara maka dibentuklah hukum. Maka dalam membahas negara tidak terlepas dari kedaulatan manusia dalam menentukan jalan kehidupan sosialnya. Manusia dalam pengertian kebertahanan, bergerak dari individu menuju relasi sosial sehingga hukum dalam makna yang lebih tegas adalah sistem yang dihasilkan dari sebuah kesepakatan ataupun konsensus yang lazim disebut kontrak sosial. Dalam pengertian ini, kekuasaan bersumber dari hukum yakni kesepakatan sosial. Dengan demikian kedaulatan dalam negara ada pada hukum yang seluruh entitas politiknya, sosial, dan ekonomi dibawahnya tunduk pada hukum tersebut. Dalam hal ini pemerintahan pun tunduk pada hukum.²

¹Mahmuddin, *Ideologi Kajian Islamisme* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 85.

²Fajlurahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara press, 2016), h. 1.

Namun dalam perkembangannya saat ini, hampir seluruh negara telah menerapkan konsepsi negara hukum dengan segala varian asas dan bentuknya, walaupun masih terdapat negara-negara tertentu yang bertahan dengan sistem kedaulatan berdasarkan kekuasaan. Dalam mengartikan hukum sebagai asas kedaulatan, terdapat dua tradisi dalam konsepsi negara hukum yaitu, konsep negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi konsepsi negara hukum *the rule of law*. Dalam konsepsi negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum dimengerti sebagai penegakan hukum yang tertulis dalam undang-undang sesuai dengan paham legisme yakni hukum identik dengan undang-undang sehingga ada kepastian hukum. Sementara konsepsi negara hukum *the rule of law*, dimengerti bahwa penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis belaka, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis.³

Hasbi Ash Shiddieqi mendefinisikan hukum Islam adalah koneksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat. Dalam khasanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum dasandarkat kepada kata Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *Mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua muslim. Kedudukan hukum Islam sangat penting dalam menentukan pandangan

³Zuhri, *Sejarah Politik Islam* (Yogyakarta: Tarjih, 2002), h. 2.

hidup serta tingkah laku mereka, tidak terkecuali pemeluk Islam di Indonesia, Di sinilah, kata hukum Islam merupakan terjemahan atau penjabaran dari *syariah* dan *fiqh* sekaligus.⁴

Seperti yang dikatakan Mahfud MD dalam bukunya *Perdebatan Hukum Tata Negara* beliau mengatakan bahwa posisi syariat Islam di dalam tata hukum nasional merupakan sumber hukum materil yang dapat digabung secara elektis dengan sumber-sumber hukum yang lain untuk kemudian menjadi sumber hukum formal. Hukum Islam tidak dapat secara eksklusif menjadi sumber hukum formal tersendiri, peribadatan seperti penyelenggaraan haji, zakat dan sebagainya. negara tidak dapat mewajibkan berlakunya hukum agama tertentu, tetapi negara wajib melayani dan melindungi secara hukum bagi mereka yang ingin melaksanakan ajaran agamanya dengan kesadaran sendiri.⁵

Yudi Hartono mengatakan, dalam sejarah Indonesia tercatat bahwa relasi kuasa antara agama dan negara memperlihatkan hubungan yang simbiotik negara sebagai pengayom bagi Agama-agama dan ada batas yang jelas dalam kewenangan atau campur tanga negara terhadap agama maupun sebaliknya. Negara dan agama berdasarkan fungsi dan perannya menjadi relasi yang tidak saling menguntungkan secara negatif.⁶

Dalam kerangka determinasi antropologis, manusia membutuhkan struktur kehidupan yang disebut dengan polis atau negara (*state*). Meskipun demikian, kebutuhan manusia terhadap politik pada bentuknya yang konkrit, tidak serta merta

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998),h. 7.

⁵Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara* (Cet. II: Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 246.

⁶Yudi Hartono, *Agama dan relasi Sosial* (Yogyakarta: LKIS Yoyakarta, 2002), h. 43.

terbentuk menjadi struktur kenegaraan dalam tatanannya yang sudah modern seperti saat ini. Struktur kenegaraan mengalami proses evolusi politik dari bentuk yang sangat sederhana berupa kumpulan (*bands*), suku (*tribes*), *chiefdom* dan terakhir negara (*state*). Hal ini memberi kesan bahwa karena adanya kesamaan dan kesatuan langkah yang muncul di tengah-tengah masyarakat untuk membentuk suatu kelompok dalam upaya mencapai tujuan bersama, lahirlah suatu kelompok masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi sebuah negara. Sementara itu, dari tujuan kesejarahan, negara dalam pengertian sekarang boleh dikatakan merupakan gejala yang relatif muncul belakangan. Ketika zaman Yunani kuno sesungguhnya manusia sudah menyadari arti pentingnya negara bagi manusia, tetapi bentuk negara yang ada dalam pandangan mereka tidak lebih luas dari negara-negara kota. Negara dalam pengertian yang sangat sederhana ketika itu diperlukan untuk mencapai perkembangan manusia dalam peradabannya, terutama keinginan masyarakat untuk mengatur sendiri berbagai kepentingannya, baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya berdasarkan aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Tampaknya, satu-satunya dasar pertimbangan yang digunakan adalah teori perjanjian masyarakat.⁷

Negara menjadi fokus utama dari studi atau ilmu politik dengan memusatkan perhatian pada lembaga-lembaga negara dan bentuk formal dari lembaga tersebut. Dengan demikian, negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada di masyarakat. Bahkan kalau perlu, negara memiliki

⁷Nazaruddin, *Pemikiran Islam Dan Negara* (Palu: STAIN Datokarama, 2006), h. 206.

keabsahan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam memaksakan kepatuhan masyarakat terhadap perintah yang dikeluarkan.

Kekuasaan yang sangat besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umum, negara dapat memaksakan kehendaknya melawan kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat yang lebih kecil jumlahnya.

Menurut mazhab teori negara, pokok bahasan politik paling tepat dan wajar adalah negara. Sementara mereka yang menganut mazhab kekuasaan berargumen bahwa negara itu hanyalah wadah belaka dan digambarkan tidak lebih dari suatu bidak belaka, menurut Robert dahl, negara adalah sebuah bidak yang penting dalam pertarungan kekuasaan karena sumber-sumber negara yang relatif dan klaimnya yang eksklusif untuk mengatur alat-alat kekerasan fisik yang hebat, sehingga barangsiapa mengendalikan negara sudah pasti memiliki kekuasaan.

Pengertian formal negara menunjukkan bahwa negara memiliki otoritas yang besar, karena hanya negara yang patut ditaati aturan hukumnya, hanya negara yang dapat membuat kerangka dan batas bagi kehidupan masyarakat, aturan yang dibuat negaralah yang disebut hukum, semua aturan hukum yang ditetapkan masyarakat hanya berlaku sejauh aturan itu sesuai dengan hukum yang ditetapkan negara. Pengakuan masyarakat terhadap wewenang negara dalam menetapkan hukum dan untuk menjamin keberlakuannya termasuk hakikat negara. Negara berkuasa karena masyarakat bersedia untuk mengakui wewenangnya.⁸

Di kalangan masyarakat muslim wacana kepemimpinan pada umumnya dan pemimpin khususnya selalu menghiiasi lembar sejarah sejak Rasulullah wafat hingga

⁸Syarifuddin Jurdi, *Politik Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 24.

saat ini siapa sebenarnya yang dapat dianggap wakil umat untuk mengurus kepentingan umat.

Perkembangan Islam sejak sejarah kemunculannya lebih banyak ditandai dengan nuansa politik, sehingga melihat perkembangan Islam harus dikaitkan dengan aktifitas politik. Sejarah menunjukkan, Islam mulai tampil di pentas politik semenjak Rasulullah hijrah ke Madinah, tahun 1 H bertepatan dengan tahun 622 M. Kekuasaan pemerintahan meliputi semenanjung Arabia. Kemudian memasuki abad 8 dan 9 M wilayah itu membentang dari Maroko bahkan menyebrang ke Spanyol. Di dunia Islam saat ini, kriteria kepala negara juga sangat beragam. Di Pakistan, misalnya, seseorang dapat dipilih menjadi presiden dengan syarat: muslim, dan berusia sekurang-kurangnya 45 tahun (pasal 41 ayat 2 konstitusi Pakistan). Di Iran, kualifikasi seorang presiden mencakup: *Iranian origin, Iranian nationality, a good past record, trustworthy and piety, and convince belief in the fundamental principles of Islamic Republic of Iran, and the official madzhab of the country* (Article 115, *The Constitution Of the Islamic Republic of Iran*). Di Maurithinia, presiden pun harus seorang muslim (pasal 23 konstitusi Republik Maurithinia 1991). Saudi Arabia, Pakistan, Brunei Darussalam, Libya, Irak, dan Malaysia menyebut Islam sebagai agama resmi negara, sedangkan Indonesia mengatakan dalam pasal 29 UUD 1945 pada ayat bahwa negara berdasarkan asas ketuhanan yang maha esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap warga negara untuk memeluk agamanya dan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing.⁹

Fakta empiris menunjukkan, perilaku politik antara masyarakat Islam dalam sebuah kurun waktu yang berbeda dari kurun waktu yang lain. Perbedaan komunitas

⁹Zuhri, *Sejarah Politik Islam* (Yogyakarta: Tarjih, 2002), h. 1.

muslim juga melahirkan perbedaan perilaku politik yang sering saling berbenturan. Begitu juga dalam dimensi kehidupan lain. Seperti perilaku ritual, ekonomi, budaya selalu ada perbedaan. Dan pembelajaran fikih dan akidah dipadati dengan perbedaan.

Pada masa kekhalifan Imam Ali terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Muawiyah bin abu sofyan dan berujung pada terbunuhnya Imam Ali sehingga kekhalifan berhasil dihancurkan dan Dinasti Umayyah pun berdiri dengan ibukota Damaskus kemudian setelah kehancurannya Dinasti berpindah tangan ke keluarga Abbasyiah dengan ibukota Baghdad mulai tahun 750 sampai dengan 1258 M.¹⁰

Kemudian setelah Baghdad jatuh memasuki abad 14, melalui proses panjang pemerintahan berpindah ke Turki hingga pada awal abad 20. Di tengah membesarnya Turki terdapat kerajaan besar Islam lainnya, Mughal di India dan Safawi di Persia. Dengan format kerajaan ini maka sistem suksesi adalah seperti yang terjadi di kerajaan pada umumnya, tidak seperti yang terjadi pada masa *Khulafa al-Rasyidin*. Selama berlangsung budaya kerajaan, tidak ada pikiran pembatasan periode jabatan. Bila ada yang tidak sabar maka pergantian kekuasaan melalui perang saudara.

Pada abad 19, ketika pengaruh Barat terhadap sistem pemerintahan Turki Usmani semakin kuat, dunia politik Islam mulai diwarnai ketegangan. Menyelenggarakan pemerintahan negara mulai tersosialisasikan ditandai dengan lahirnya *Tanzimat* dan konstitusi dibawah kepeloporan kelompok Usmani muda. Pemikiran semacam ini terasa ganjil bagi dunia Islam karena selama ini kekuasaan itu hanya dipilah menjadi *darul Islam* dan *darul Harb*.

Pemilahan wilayah kekuasaan tersebut didasarkan hubungan keagamaan, bukan hubungan kebangsaan, sehingga yang dimaksud *darul Islam* adalah suatu

¹⁰Zuhri, *Sejarah Politik Islam* (Yogyakarta: Tarjih, 2002), h. 2.

kekuasaan politik. Setelah perang Dunia pertama dan kedua dunia Islam menemukan iklim lain. Masyarakat Islam mendirikan negara yang didasarkan kebangsaan dan territorial. Ada yang mengambil bentuk kerajaan dan ada juga yang mengambil bentuk republic. Corak negara dan pemerintahan setelah era demokrasi semenjak revolusi Perancis berdampak kepada kesadaran baru di dunia Islam, bahwa loyalitas tidak harus pada khalifah yang cakupannya adalah seluruh dunia tetapi kepada negara dan pemerintahan kebangsaan yang teritorialnya lebih konkret. Karena kesadaran ini menimbulkan dampak lain, terjadinya perpecahan, setidaknya rasa kurang peduli sesama muslim karena perbedaan kesukuan dan kebangsaan, maka muncul ide mengembalikan kekhalifan agar dapat mengikat dunia Islam kendati format negara tetap berjalan.¹¹

Umat Islam memulai hidup berorganisasi setelah Nabi hijrah ke Yathrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Madinah untuk pertama kali lahir suatu komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan Nabi. Tidak lama setelah Nabi menetap di Madinah, beliau membuat satu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas yang merupakan komponen masyarakat majemuk di Madinah. Banyak di antara pemimpin dan pakar politik Islam beranggapan bahwa Piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam yang pertama didirikan oleh Nabi di Madinah.¹²

Apakah Nabi mewariskan sistem atau format tertentu tentang kepemimpinan? Ada dua jawaban, ya dan tidak. Ya, bila yang dimaksud adalah sistem kepemimpinan keagamaan. Tidak, bila yang dimaksud adalah sistem

¹¹Zuhri, *Sejarah Politik Islam* (Yogyakarta: Tarjih, 2002), h. 6.

¹²Muhammad Munawwir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara* (Penerbit Universitas Indonesia: UI press, 1993), h. 9.

kepemimpinan sosial kenegaraan. Sejak Abu Bakar sampai Ali tidak ada satu konsep baku mengenai mekanisme penunjukan *Khalifah*. Bahkan seandainya peristiwa di *Saqifah Bani Saidah* dianggap sebagai sistem pemilihan pemimpin yang terbaik, niscaya Abu Bakar sendiri akan meniru sistem tersebut. Nyatanya, Abu Bakar lebih memilih untuk menunjuk Umar secara langsung kemudian diikuti sahabat yang lainnya sebelum beliau wafat. Begitu pula ketika Umar terluka, beliau lebih memilih enam orang pembesar sahabat untuk menjadi kandidat *Khalifah* setelahnya, dan begitu seterusnya.¹³

Dalam perkembangan pemikiran Islam, terjadi perbedaan pendapat mengenai konsep negara Islam. Bahkan pendapat mengenai hubungan antara negara dan agama masih dipertentangkan. Perbedaan tentang siapa pemimpin setelah nabi dan dinamika politik pada masa *Khalifah Al-Rasyidin* akhirnya melahirkan mazhab politik dalam Islam yang dikenal dengan nama *Syiah*, *Sunni*, dan *Khawarij*.

Di kalangan kaum orientalis terdapat aneka ragam pandangan tentang negara Islam. Setelah peran dunia kedua, terdapat kecenderungan sebagai kaum Orientalis mulai rasional dan objektif dalam memahami Islam. Hal ini mungkin kemajuan ilmu pengetahuan dan mulai redanya sikap permusuhan Barat terhadap kaum Muslimin. Kemampuan mereka untuk melihat Islam secara objektif dan rasional sangat berpengaruh pada pandangan mereka tentang negara Islam. Mereka tidak lagi bersikap apriori tanpa alasan yang jelas, dan mulai menampakkan simpati dan sikap hormat kepada Islam, penganut serta sejarah peradabannya.¹⁴

¹³Tim Ahlulbait Indonesia. *Syiah Menurut Syiah* (Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014), h. 353.

¹⁴Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam* (Jakarta: Teraju, 2002), h. 120.

Dalam perkembangan sejarah Islam, keragaman pemikiran politik ini melahirkan pula berbagai praktik ketatanegaraan yang berbeda di kalangan umat Islam. Perbedaan tersebut semakin mengental ketika Islam menghadapi kolonialisme Barat pada abad ke 19 M. Barat disamping menguasai daerah-daerah Islam, juga melakukan ekspor terhadap pemikiran dan ideologi politik mereka. Hal ini mendapat respons dari kalangan umat Islam sendiri, baik dengan cara menerima bulat-bulat, menolak mentah-mentah, maupun mengapresiasikannya secara kritis dengan mengambil nilai-nilainya yang dipandang positif dan membuang nilai-nilainya yang negatif.¹⁵

Polarisasi dari ketiga sikap ini lahir dari tiga pandangan yang berbeda tentang Islam dan ketatanegaraan atau politik. Sikap pertama lahir dari pemikiran bahwa Al-Qur'an tidak membawa konsep tentang negara yang baku dan Nabi Muhammad saw juga tidak dimaksudkan oleh Allah untuk menciptakan kekuasaan politik. Tugas Nabi Muhammad saw hanyalah sebagai pembawa wahyu bukan sebagai pemimpin politik atau untuk mendirikan negara. Karena itu, umat Islam harus meniru Barat untuk mencapai kemajuan mereka.¹⁶

Sedangkan sikap kedua lahir dari pandangan bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an ibarat *supermarket* telah menyediakan sistem politik yang mesti diikuti oleh umatnya. Hal demikian diimplementasikan pula oleh Nabi Muhammad saw dalam membangun Madinah sebagai negara dan pemerintahan pertama dalam sejarah Islam yang

¹⁵Usman Jafar, *Islam Dan Politik* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 2.

¹⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Cet 1; Jakarta: Rader Jaya Pratama, 2001), h. 31.

kemudian dilanjutkan oleh Khalifah sesudah beliau. Inilah yang mesti diteladani dan diikuti oleh umat Islam.

Sikap ketiga, menyatakan bahwa Islam memang tidak menyediakan konsep negara yang baku untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan negara dan pemerintahan. Tetapi, Islam juga tidak membiarkan umatnya tanpa petunjuk dan pedoman dalam mengelola negara dan pemerintahan, Islam hanya memberikan seperangkat tata nilai yang mesti dikembangkan oleh umatnya sesuai dengan tuntutan situasi, masa dan tempat serta permasalahan yang mereka hadapi.¹⁷

B. Pemimpin dan Kepemimpinan

Berbagai teori telah memberikan landasan pemikiran dan konsep kepemimpinan yang menyebutkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh potensi dan faktor lain yang mempengaruhi serta sejauh mana seorang pemimpin tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagai pemimpin.¹⁸

Secara teoretis banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli tentang kepemimpinan. Mulai dari teori secara umum, sampai kepada teori-teori yang dikembangkan pada masing-masing bidang kehidupan yang membutuhkan kepemimpinan dengan corak dan gaya kepemimpinan tertentu. Kreiner menyatakan bahwa *leadership* adalah proses mempengaruhi orang lain yang mana seorang pemimpin mengajak anak buahnya secara sukarela berpartisipasi guna mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Hersey menambahkan bahwa *leadership* adalah usaha untuk mempengaruhi individual lain atau kelompok. Seorang pemimpin harus

¹⁷Usman Jafar, *Islam Dan Politik* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 3.

¹⁸Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Pemimpin Militer* (Jakarta: Amzah, 2006), h.

memadukan unsur kekuatan diri, wewenang yang dimiliki, ciri kepribadian dan kemampuan sosial untuk bisa mempengaruhi perilaku orang lain.¹⁹

Sejarah mencatat dan menilai bahwa beberapa pemimpin dunia di antaranya tampil sebagai pemimpin yang baik, namun ada juga pemimpin yang buruk. Karena perannya yang sangat penting dalam kehidupan sosial, maka tidak heran jika manusia terus bergumul tentang masalah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kata yang telah memiliki imbuhan dan dasar kata adalah pimpin, yang bermakna dibimbing atau dituntun.²⁰

Dalam arti umum, pemimpin adalah seorang yang dengan segala kemampuannya mengarahkan, membimbing, mempengaruhi atau mengawasi pikiran, perasaan dan tindakan orang lain. Pengaruh ini bisa dijalankan dengan perantara hasil karyanya, seperti buku-buku, lukisan-lukisan, penemuan-penemuan atau bisa dijalankan dengan mengadakan hubungan-hubungan pribadi.

Teori genetis berpendapat bahwa orang dapat menjadi pemimpin karena sudah ditakdirkan menjadi pemimpin dengan bakat yang dibawa sejak lahir dan teori sosial mengemukakan bahwa kepemimpinan itu bukan ditakdirkan akan tetapi dibentuk oleh pengaruh lingkungan, maka teori ekologis mengakui keduanya, artinya bahwa seseorang itu hanya akan bisa menjadi pemimpin apabila ia memiliki bakat kepemimpinan dan bakat kepemimpinan kemudian dapat dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang mendukung untuk itu.²¹

¹⁹Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Pemimpin Militer*, h. 5

²⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1471.

²¹Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Pemimpin Militer*, h. 5.

Dalam perjalanan sejarah manusia yang sangat panjang, pemimpin hampir selalu menjadi fokus dari semua gerakan, aktifitas, usaha, dan bahan menuju kemajuan di dalam kelompok atau organisasi. Dia merupakan agen primer untuk menentukan struktur organisasi/kelompok yang dibinanya, juga memberikan motivasi kerja, dan menentukan sasaran bersama yang akan dicapai. Ringkasnya, pemimpin merupakan *inisiator*, *motivator*, *stimulator*, dan *invator* dalam organisasinya. Sedangkan kemunculan dirinya itu pada umumnya terjadi mulai banyak cobaan dan tantangan di tengah kehidupan. Lagi pula fungsi kepemimpinan itu merupakan sebuah kebutuhan yang muncul dari suatu situasi khusus, misalnya: masa krisis, perang, revolusi, transisi sosial, kondisi ekonomi, dan lain-lain. Superioritas pribadinya itulah yang menjadi unsur kekuatan baginya, yang jelas menjadi rangsangan psikososial, dan menerbitkan respon kolektif dari anak buahnya. Kekuatan sedemikian itu mampu mendominasi lingkungannya; dan sifatnya konsultif, koordinatif, membimbing, sehingga anak buah menjadi patuh pada dirinya, menghormati, bersikap loyal dan bersedia bekerja sama dengan semua anggota.²²

Kepemimpinan dalam suatu wilayah adalah merupakan suatu keniscayaan, karena pemimpin yang benar-benar layak sebagai titik sentral dalam menentukan kesejahteraan masyarakat dan maju mundurnya sebuah daerah atau wilayah. Karena itu harus dibutuhkan pemimpin yang benar-benar layak sebagai seorang pemimpin yang dapat menggerakkan roda pemerintahan.²³

Pemimpin merupakan sebuah tugas yang berat, adapun dalam kepemimpinan dibutuhkan ciri-ciri pemimpin yang memang betul-betul layak. Seorang pemimpin

²²Afzalur Rahman, *Nabi Muhammad Sebagai Pemimpin Militer*, h. 19.

²³Mahdi Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Islam* (Yogyakarta: al-muhsin, 2002), h. 15.

biasanya memiliki intelegensia yang lebih tinggi dibanding dengan pengikutnya dan cakap akan keinginan rakyatnya, memiliki kemampuan verbal yang luar biasa, sehingga dapat mengkomunikasikan apa yang diinginkannya kepada rakyatnya.

Kepemimpinan memiliki banyak variasi dan banyak yang mencoba untuk mendefenisikan tentang kepemimpinan ini. Kepemimpinan berasal dari kata pimpin imbuhan. Pemimpin adalah orang yang memiliki segala kelebihan dari orang-orang lain. Pemimpin dalam pandangan orang kuno adalah mereka yang dianggap paling pandai tentang berbagai hal yang ada hubungannya dengan kelompok, dan pemimpin harus pandai melakukannya (pandai berburu, cakap dan pemberani dalam berperang).²⁴

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, baik secara struktur maupun fungsinya. Artinya kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang mempunyai keterkaitan baik dari segi kata maupun makna.²⁵

Istilah pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata pimpin yang mempunyai arti dibimbing. Sedangkan kata kepemimpinan itu sendiri mempunyai makna cara untuk memimpin. Jadi, pemimpin adalah orang yang memimpin atau ditunjuk menjadi pembimbing bagi yang menyetujui.²⁶

Kehidupan suatu rakyat dapat berjalan secara teratur dan hubungan sesama manusia dapat berjalan dengan rukun dan damai, maka diangkatlah seorang pemimpin yang diberikan kewenangan untuk mengomandoi pelaksanaan aturan yang

²⁴Nalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan* (Jakarta: Mutiara, 1984), h.38.

²⁵Nalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, h. 39.

²⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1075.

telah ditetapkan. Mengingat perannya yang sangat signifikan, maka dalam Islam pengangkatan seorang pemimpin adalah suatu yang urgen. Bahkan jika ada tiga orang muslim melakukan perjalanan jauh, Rasulullah menganjurkan salah seorang mereka diangkat sebagai pemimpin, dan inilah merupakan gambaran bahwa sangat dibutuhkannya seorang pemimpin.

Pada dasarnya Al-Qur'an tidak pernah secara tersirat menyebutkan kata kepemimpinan, karena kepemimpinan (*leadership*) merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Dalam manajemen, *leadership* adalah suatu faktor penting yang mempengaruhi berhasil atau gagalnya suatu organisasi. Memang betul bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya manakala sumber permodalan tercukupi, struktur organisasinya berjalan, dan tenaga terampilnya tersedia. Sekalipun demikian, kepemimpinan memegang peranan penting yang mesti dipertimbangkan. Tanpa pemimpin yang baik, roda organisasi tidak akan berjalan lancar, dengan kata lain, kepemimpinan merupakan faktor penentu bagi efektivitas dan efisiensi kegiatan organisasi.

Meskipun demikian, bukan berarti Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali masalah kepemimpinan. Sebagai petunjuk bagi manusia (*hudan li al-nas*), selain menyebutkan tentang pemimpin (*imam, a'immah, wali, khalifah* dan lain-lain) Al-Qur'an juga mengemukakan tentang prinsip dasar kepemimpinan seperti amanah, keadilan dan musyawarah.²⁷

Memimpin (*to lead*) berbeda dengan mengomandokan (*to command*). Pemimpin (*leader*) berbeda dengan komandan. Pemimpin berusaha supaya orang yang dipimpinnya mau melakukan apa yang dianjurkannya karena kesadaran bahwa

²⁷Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 114.

yang dianjurkan itu adalah kemauan orang yang dipimpin itu sendiri. Apa yang ingin dicapai adalah keinginan, cita-cita dan kepentingan bersama antara yang dipimpin dengan yang memimpin.²⁸ Sedangkan kepemimpinan adalah keseluruhan tindakan untuk mempengaruhi atau mengajak orang lain dalam usaha bersama untuk mencapai tujuan. Dapat pula dikatakan bahwa kepemimpinan adalah usaha untuk mencapai tujuan yang menggunakan tenaga orang lain.

Tiap organisasi yang memerlukan kerjasama antar manusia dan menyadari bahwa masalah manusia yang utama adalah masalah kepemimpinan. Kita melihat perkembangan dari kepemimpinan pra ilmiah kepada kepemimpinan yang ilmiah. Dalam tingkatan ilmiah kepemimpinan itu disandarkan kepada pengalaman intuisi, dan kecakapan praktis.

Kepemimpinan itu dipandang sebagai pembawaan seseorang sebagai anugerah Tuhan. Karena itu dicarilah orang yang mempunyai sifat-sifat istimewa yang dipandang sebagai syarat suksesnya seorang pemimpin. Dalam tingkatan ilmiah kepemimpinan dipandang sebagai suatu fungsi, bukan sebagai kedudukan atau pembawaan pribadi seseorang. Maka diadakanlah suatu analisa tentang unsur-unsur dan fungsi yang dapat menjelaskan kepada kita, syarat-syarat apa yang diperlukan agar pemimpin dapat bekerja secara efektif dalam situasi yang berbeda-beda. Pandangan baru ini membawa pembahasan besar.

Cara bekerja dan sikap seorang pemimpin yang dipelajari. Konsepsi baru tentang kepemimpinan melahirkan peranan baru yang harus dimainkan oleh seorang pemimpin. Titik berat beralih dari pemimpin sebagai orang yang membuat

²⁸Bustanuddin Agus, *Islam dan Pembangunan* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 48.

rencana, berfikir dan mengambil tanggung jawab untuk kelompok serta memberikan arah kepada orang-orang lain. Kepada anggapan, bahwa pemimpin itu pada tingkatan pertama adalah pelatih dan koordinator bagi kelompoknya.²⁹

Kepemimpinan adalah pangkal utama dari penyebab terlaksananya suatu kegiatan proses atau kesediaan untuk memperoleh pandangan atau sikap dari suatu kelompok karena adanya pemimpin yang dapat ditaati.

Mengangkat seorang pemimpin hukumnya *fardu kifaya*. Artinya, proses dan penentuan seorang pemimpin adalah kewajiban rakyat. Pada pundak merekalah pertama kali kewajiban tersebut dibebankan. Karena bagaimanapun, jika dalam suatu komunitas tidak ada yang memimpin niscaya tatanan kehidupan yang harmonis tidak akan pernah tercipta. Semua akan bertindak sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena itu, umat lalu dituntut untuk membentuk suatu tata-atur kehidupan yang dikendalikan oleh pemimpin. Perlu diingat, walaupun begitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat punya hak penuh untuk memilih dan memberhentikan pemimpin.³⁰

Pemimpin harus punya kemampuan untuk mengajak orang lain, mau berbuat atau berjuang secara ikhlas, tetapi harus dengan syarat melakukannya dengan semangat dan kesadaran sendiri untuk taat kepada pemimpinnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisaa'/4:59 yaitu;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

²⁹Hamzah Yakub, *Teknik Dakwah dan Leadership* (Bandung: Diponegoro, 1981), h. 115.

³⁰Abu Yasid, *Fikih Politik* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 47.

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.³¹

Ayat ini, bersama dengan beberapa ayat yang menyusulnya, membicarakan salah satu masalah yang paling penting dalam Islam, yakni masalah kepemimpinan. Ayat-ayat tersebut menentukan sumber sejati taklid kaum Muslim dalam berbagai masalah sosial dan keagamaan mereka. Pertama-tama, ia memerintahkan kepada mereka yang beriman, dengan mengatakan, *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah*. Adalah jelas, bahwa bagi seorang yang beriman, semua kepatuhan harus dibimbing kepada kepatuhan kepada Allah. Selanjutnya, setiap bentuk kepemimpinan harus berasal dari zat-Nya yang suci dan diadopsikan kepada perintah-Nya, sebab Dialah Penguasa dan Pemilik genetic dunia eksistensi, dan setiap kedaulatan dan kepemilikan harus berada di bawah perintah-Nya.

Untuk tahap yang kedua, ia mengatakan, *dan taatilah Rasul*. Taatilah Nabi yang suci dan tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, seorang Nabi yang ditunjuk dari sisi Allah dari kalangan Manusia, yang perkataannya adalah perkataan Allah, dan yang kedudukan serta posisinya telah dianugerahkan kepadanya oleh Allah. Dan, untuk tahap yang ketiga, ia mengatakan, *dan ulil amri di antara kamu*. Taatilah orang-orang yang berasal dari dalam masyarakat Islam dan lindungilah baik agama Tuhan maupun urusan-duniawi masyarakat.³²

Pemimpin harus punya kemampuan dan militansi yang luar biasa melebihi yang dipimpinnya. Pemimpin adalah orang yang memberi semangat, kesadaran, dan perjuangan kepada yang lain. Karena itu ia harus punya semangat, kesadaran dan kemampuan berjuang yang jauh lebih tinggi daripada yang dipimpinnya.

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Bandung: Ar-Raafi', 2012), h. 128.

³²Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran* (Jilid 4; Al-Huda), h. 75.

Selain itu pemimpin juga harus teguh pada pendirian, bermental baja, punya keyakinan yang kokoh. Karena itu agama Islam mengajarkan bahwa akidah, iman dan keyakinan dalam mengarungi lautan kehidupan ini harus teguh kuat dan selalu diisi dengan ibadah, zikir, dan fikir dengan *tadabbur* serta kemampuan atau potensi yang ada. Kemampuan dan potensi tersebut antara lain:

1. Kelebihan dan kemampuan dalam mengendalikan organisasi atau kelompok kerja yang dipimpin.
2. Kelebihan dalam kepribadian yang unik.
3. Kelebihan dalam pengetahuan (terutama merumuskan ide-ide dan menuangkannya dalam perencanaan yang diwujudkan dalam pengambilan keputusan).³³

Dengan demikian bentuk-bentuk kepemimpinan dapat dilihat dari dua segi yaitu; dari segi jenis dan segi fungsinya. Dilihat dari segi jenisnya, maka apabila didasarkan pada situasi dan usaha untuk mencapai tujuan yang dikehendaki atau yang hendak dicapai pemimpin dapat dibagi atas tiga jenis, yaitu:

1. Pimpinan formal, yaitu pimpinan diangkat berdasarkan hukum yang berupa surat keputusan. pengangkatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga yang mempunyai kegiatan yang berencana dengan sistem yang sengaja dibentuk untuk mengendalikan usaha yang mempunyai ketentuan hukum.
2. Pimpinan non formal, yaitu pimpinan yang diberikan wewenang secara jelas oleh kelompok anggotanya tanpa memiliki kekuatan hukum yang berupa surat

³³Usna Asmara, *Pengantar kepemimpinan Kependidikan* (Cet II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 6.

keputusan, jadi muncul dari keinginan atau berdasarkan pemilihan anggota kelompoknya.

3. Pimpinan informal, yaitu pimpinan yang tidak jelas statusnya dalam suatu informasi atau kelompoknya tetapi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap anggota kelompoknya walaupun tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan atau mengatur kelompoknya.

Akan tetapi apabila dilihat dari segi kategori maka pimpinan dapat pula digolongkan atas:

1. Pemimpin yang perinsipil, yaitu pemimpin yang mendasarkan kepemimpinannya pada suatu faham atau prinsip dasar yang dianutnya. Dalam kepemimpinan lain senantiasa menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan paham yang dianutnya dan sebaliknya.
2. Pemimpin yang fleksibel, yaitu pemimpin yang dapat menyesuaikan diri dengan mempertimbangkan berbagai faktor sehingga suasana batin dari orang yang dipimpinnya serta berusaha mencapai dengan tidak mengabaikan paham dasar yang dianutnya tetapi sekaligus memilih cara sesuai untuk mencapai sasaran tersebut.
3. Pemimpin plin-plan, yaitu pemimpin yang tidak mempunyai pendirian untuk diyakini, tidak berpedoman kepada kebijakan yang jelas. Ia mudah bertolak haluan karena suatu pengaruh dan orang yang dipimpinnya.
4. Pemimpin macchiavelis, yaitu pemimpin yang mengutamakan kepemimpinan dirinya sendiri terutama kepentingan kekuasaan supaya tetap berlangsung.³⁴

³⁴Usna Asmara, *Pengantar Kepemimpinan Kependidikan* (Cet II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 8.

Ada pula yang membagi pemimpin menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin charisma, yaitu pemimpin yang memiliki pengaruh besar sehingga mampu menggerakkan orang yang dipimpinnya untuk menjadi pengikut yang taat.
2. Pemimpin simbol, yaitu pemimpin yang ditempatkan oleh kelompok tertentu sebagai pengikut tanpa harus ikut aktif menentukan berbagai kebijaksanaan, semua diserahkan pada anggota.
3. Pemimpin headman, yaitu pemimpin yang ditunjuk karena penghormatan sesuai dengan fisiknya, kedudukannya dalam masyarakat dianggap penting.
4. Pemimpin expert, yaitu pemimpin yang ditunjuk karena memiliki suatu keahlian dalam bidang tertentu yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain dalam kelompoknya.
5. Pemimpin organisator, yaitu pemimpin yang menarik keuntungan untuk dirinya dan mampu mendapat dukungan dari berbagai pihak dengan alasan masing-masing 1%.

Dari bentuk-bentuk kepemimpinan yang diuraikan di atas, maka salah satu contoh tauladan yakni Nabi Muhammad Saw., pemimpin yang diakui oleh lawan dan kawan, sangat ikhlas, sangat teguh pendirian (kuat imannya), dan tidak gila hormat. Apalagi soal kekayaan tidak sedikitpun terpikir oleh beliau. Beliau tidur di tikar yang dibuat dari jerami korma sehingga ketika bangun berbekas di pipi, dan Umar bin Khattab menangis melihat kesederhanaan penguasa, presiden atau kaisar yang seluruh Jazirah Arabia berada di tangannya. Bahkan menjadi panglima perang pun, beliau

tidak hanya tinggal memerintah dan memberikan komando. Beliau pernah luka-luka di medan perang. Beliau adalah Rasulullah dan *uswatun hasanah* bagi siapa saja yang mencalonkan diri atau memilih pemimpin.³⁵

Ajaran Islam sungguh mengandung ilmu kepemimpinan yang sangat dalam. Sebagai manusia biasa, rasanya tidak mungkin Rasulullah akan punya mental kepemimpinan yang demikian tangguh. Hanya satu yang membedakan beliau dengan pemimpin dunia yang lain, baik Muslim maupun non Muslim. Beliau punya daya kepemimpinan yang datang dari Allah yang maha Tahu, Pencipta alam dan manusia dan selalu mengisi kepemimpinan beliau dengan berhubungan dengan (iman, takwa dan ibadah, usaha dan doa) dengan maha sumber kepemimpinan itu.

C. Prinsip-prinsip Kepemimpinan

Ada beberapa prinsip dasar kepemimpinan sebagaimana telah disinggung pada materi sebelumnya yaitu:

1. Amanah

Kekuasaan itu amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah. Ungkapan tersebut menyiratkan dua hal. Pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi pemimpin, maka kekuasaan yang dipeoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah swt. (*delegation of authority*) karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relatif, yang kelak harus dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya. *Kedua*, karena kekuasaan itu pada dasarnya

³⁵Bustanuddin Agus, *Islam dan Pembangunan* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 50.

amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggungjawaban, jujur dan memegang teguh prinsip. Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai.³⁶

Amanah dengan demikian adalah salah satu prinsip kepemimpinan. Nabi Muhammad saw disebutkan memiliki empat citi kepemimpinan. Yaitu *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya dan dihandalkan), dan *fathana* (cerdas dalam pengetahuan) dan *tabligh* (berkomunikasi).

Oleh karena itu, menurut konsep Islam, semua orang adalah pemimpin. Dan setiap orang harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada sesamanya di dunia dan kepada Tuhan kelak di akhirat. Adanya pertanggungjawaban ini bermakna bahwa seorang pemimpin di manapun dan apapun level dan posisinya, ia memegang amanah, dalam hal ini bisa rakyat maupun Tuhan. Rakyat sebagai pemegang amanah, karena amanah sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diartikan sama dengan kontrak sosial. Sedangkan Tuhan jelas sebagai pemegang dan pemberi amanah kepada manusia. Pernyataan ini terdapat dalam QS. An-Nisaa'/4: 58. yaitu:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.³⁷

³⁶Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 121.

³⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Bandung: Ar-Raafi', 2012), h. 128.

Ayat suci ini, yang darinya suatu ketentuan umum bisa dipahami, secara eksplisit mengatakan, *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*. Dalam bagian kedua ayat ini, ia menunjuk pada masalah penting lainnya, yaitu proposisi pelaksanaan keadilan dalam pemerintahan. Ayat ini, seraya menyampaikan perintah Allah, mengatakan, *dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*. Kemudian untuk menekankan kedua perintah ini, ia mengatakan, *Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu*. Sekali lagi, ayat ini menekankan dan mengatakan bahwa Allah mengawasimu dalam keadaan bagaimanapun kamu berada. Dia mendengar kata-katamu dan melihat apa yang kamu kerjakan. Ia mengatakan, *Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat*.³⁸

2. Adil

Pengertian adil dalam budaya Indonesia sebenarnya bersumber dari ajaran Islam. Pemerintah atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok. Proses politik juga berhadapan dengan berbagai kelompok dan golongan. Seorang yang terpilih menjadi pemimpin harus mampu berdiri di atas semua golongan. Untuk itu diperlukan sifat keadilan. Dalam QS Al-Ma'idah/5:8 menyebutkan keadilan sampai tiga kali.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

³⁸Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran* (Jilid 4; Al-Huda), h. 73.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁹

Ayat ini mengajak untuk menegakkan keadilan. Mula-mula, ia berbicara kepada orang-orang yang beriman dan mengatakan, *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil*. Setelah itu, ayat ini menunjuk kepada salah satu faktor penyimpangan dari keadilan dan memperingatkan kaum Muslim bahwa kebencian dan permusuhan kesukuan, atau masalah-masalah pribadi, tidak boleh menghalangi pelaksanaan keadilan dan tidak boleh menyebabkan pelanggaran atas hak-hak orang lain karena keadilan adalah sesuatu yang melampaui itu semua. Ayat diatas mengatakan, *Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil*. Karena pentingnya permasalahan, ayat di atas menekankan masalah keadilan sekali lagi, dengan mengatakan, *Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*. Dan keadilan adalah unsur yang paling penting dalam ketakwaan dan kesalehan, maka untuk ketiga kalinya ayat di atas menekankan bahwa, *sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*.⁴⁰

Berdasarkan petunjuk Allah, seorang penguasa haruslah adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Esensi dan asas pemerintahan adalah keadilan. Yang dimaksud dengan *al-haqq* dalam kasus pemerintahan adalah keadilan. Unsur pertama keadilan itu adalah *al-haqq* (kebenaran).

³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Terjemahnya* (Bandung: Ar-Raafi', 2012), h. 159.

⁴⁰Allamah Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Quran* (Jilid 4; Al-Huda), h. 317.

Secara lebih spesifik dapat diketahui pada saat Nabi Muhammad saw. berada di Madinah menghadapi berbagai golongan, yaitu orang-orang Arab musyrik, orang Nasrani dan Yahudi. Di antara mereka, kaum Yahudilah yang sering membuat ulah. Nabi mengalami kesulitan menghadapi mereka yang selalu menyiarkan kabar bohong, memprovokasi dan memutar balikkan fakta. Sebagai pemimpin umat yang majemuk tentu saja Nabi harus mampu bertindak adil.⁴¹

Keadilan dijadikan acuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia pada setiap zaman dan tempat karena dua hal. Pertama, bahwa dasar dan sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an, al-Qur'an menetapkan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang bersifat umum tentang sistem pengaturan dan pengelolaan urusan umat dalam pemerintahan. *Kedua*, bahwa tujuan Islam adalah untuk merealisasikan asas kemaslahatan umat manusia serta menolak kemudharatan.⁴²

Jadi, berbuat adil agaknya adalah standar minimal bagi perilaku manusia apakah dia sebagai saksi (dalam arti luas), penguasa (pemerintah, pemimpin) atau orang biasa. Jika menurut Islam semua orang adalah pemimpin, maka dengan sendirinya harus menegakkan keadilan dimanapun dia berada.

3. Musyawarah

Islam menggunakan istilah musyawarah sebagai pondasi utama dalam kehidupan politik, di samping elemen-elemen lain yang berperang penting. Al-Qur'an mengajarkan kepada umatnya tentang pentingnya musyawarah.

⁴¹Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 128.

⁴²Usman Jafar, *Islam dan Politik* (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 60.

Prinsip ini sepenuhnya dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi, maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat.

Secara fungsional, musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah yang berkaitan dengan masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat akan menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya. Dalam musyawarah terkandung sejumlah elemen yang dengan sendirinya akan ditemukan berkaitan dengan proses politik, yaitu apa yang disebut dengan istilah partisipasi, kebebasan, keadilan dan persamaan. Hal ini karena tidak mungkin sebuah musyawarah itu dijalankan tanpa kehadiran elemen-elemen tersebut. Ikut sertanya seseorang dalam proses musyawarah untuk memutuskan sebuah perkara atau persoalan yang sedang dihadapi, dengan sendirinya secara substansi mempunyai makna partisipasi politik.⁴³

Bila dikaitkan dengan konsep negara modern yang jauh lebih kompleks seperti sekarang ini, proses musyawarah yang dijalankan pada zaman Nabi sebenarnya secara *substantive* tidak berbeda dengan apa yang diperlihatkan dalam proses politik sekarang, yaitu dengan *representative democracy*, karena dapat dipahami bahwa Nabi melakukan musyawarah kadang-kadang tidak melibatkan segenap warga negara yang telah memiliki *political franchise*, akan tetapi musyawarah yang melibatkan sahabat-sahabat yang tentu saja sangat berpengaruh dalam lingkungan masyarakat.

⁴³Usman Jafar, *Islam dan Politik*, h. 42.

D. Konsep Imamah

Konsep Imamah berawal pada saat kafilah yang berangkat pulang dari *al-Hujjatul Widdah* (Haji Terakhir) Nabi Muhammad saw dengan serta merta berhenti.

Malaikat Jibril telah datang membawa wahyu Allah, dalam QS. al-Maidah : 67.⁴⁴

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ
يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

Wahai Rasul! Sampaikan apa-apa yang telah diturunkan padamu dari Tuhanmu, dan jika engkau tidak menyampaikannya risalah-Nya, dan Allah akan melindungimu dari manusia.

Tempat kaum muslimin berhenti tersebut bernama Ghadir Khum. Nabi Muhammad saw menyampaikan khotbah dan mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib sebagai penerusnya. Beliau berkata, “wahai muslimin! Siapa yang lebih bernilai dan utama orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri?” para hadirin menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih tahu.” Setelah mendengar ini, Nabi bersabda, “Aku adalah Tuan (*mawla*)nya orang-orang mukmin dan aku memiliki hak atas mereka bahkan lebih dari apa yang mereka miliki atas diri-diri mereka. Oleh karena itu, siapa saja yang menganggapku maulanya, maka Ali adalah maulanya.”⁴⁵ Kata *mawla* yang dimaksudkan berarti pemimpin.

Berikut ini adalah khutbah Rasulullah saw di Ghadir Khum terkait dengan wilayah kepemimpinan Ali bin Abu Thalib,

براهيم د : , : ير بن
زيد, عن محمد بن عمر بن علي, عن ابيه, عن علي, ان النبي (ص) حضر

⁴⁴Muhammad Baqir Al-Shadr, *Khilafah & Imamah* (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), h. 5.

⁴⁵Muhammad Baqir Al-Shadr, *Khilafah & Imamah* (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012), h. 6.

بخم فخرج اخذا بيد علي، فقال: يا ايها الناس، الستم تشهدون ان الله عزوج
قالوا: بلى، قال: الستم تشهدون ان الله و رسوله اولى بكم من انفسكم، وان الله
ورسوله مولياكم؟ قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فان هذا مولاه، او قال: فان عليا
ابن مرزوق، اني قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا، كتاب الله سببه
بايديكم، و اهل بيتي

Terjemahnya:

Ibrahim bin Marzuq telah menceritakan kepada kami, ia berkata, “Abu ‘Amir Al-Aqadaiy telah menceritakan kepada kami, ia berkata, ‘Katsir bin Zaid telah menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Umar bin Ali dari Ayahnya, dari Ali, ‘Bahwa Nabi saw berteduh di Khum kemudian Beliau keluar sambil memegang tangan Ali. Beliau berkata, ‘Wahai manusia, bukankah kalian bersaksi bahwa Allah ‘Azza wa Jalla adalah Rabb kalian? Orang-orang berkata. ‘Benar’. Bukankah kalian bersaksi bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih berhak atas kalian dari diri kalian sendiri dan Allah ‘Azza wa Jalla dan Rasul-Nya adalah mawla bagi kalian? Orang-orang berkata ‘Benar’. Beliau saw berkata, ‘Maka barang siapa menjadikan aku sebagai mawlanya maka dia ini juga sebagai mawlanya’ atau [Rasul saw berkata] ‘Maka Ali sebagai mawlanya’ [keraguan ini dari Ibnu Marzuq].⁴⁶

بن ارقم قال: قام رسول صل الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين
مكة والمدينة فحمد الله و اثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس
بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب

Terjemahnya:

Zaid bin Arqam berkata, “Rasulullah saw berdiri di antara kami dan berkhotbah di suatu tempat bernama Khum di antara Makkah dan Madinah. Beliau memuji Allah, memberikan nasihat, dan peringatan, Beliau bersabda, ‘Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, sebentar lagi utusan Rabbku akan datang dan ia akan diperkenankan.”

Tampak dalam riwayat Muslim di atas bahwa Rasulullah saw berkhotbah di Gadhira Khum karena ingin berwasiat sehubungan dengan sebentar lagi ia akan segera

⁴⁶Musykil al atsar lil thohawi (Universitas Hadist, juz 4), h. 306.

wafat. Wasiat tersebut adalah berpegang teguh pada *Al-Tsaqalain* dan mengangkat Imam Ali sebagai maula bagi kaum mukmin.

Peristiwa ini terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu. Namun sayangnya, peristiwa-peristiwa setelah wafatnya Nabi saw dan seakan tidak merefleksikan peristiwa pengangkatan Ali.

Imamah sering diartikan sebagai kepemimpinan. Akan tetapi dalam Konsep imam yang berkembang dalam sejarah Islam, seperti dapat dilihat dalam kitab-kitab kuning, mempunyai beberapa pengertian:

- a. Imam dalam arti “pemimpin shalat jemaah”. Imam dalam arti ini mempunyai beberapa ketentuan seperti orang yang bagus qira’atnya, wara’, dituakan. Biasanya imam dalam arti ini diberi tugas sampingan di masyarakat untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
- b. Imam dalam arti “pendiri madzhab”, seperti para pendiri madzhab empat, yaitu imam Malik, Imam hanafi, Imam Syafi’I, dan Imam Hambali.
- c. Imam dalam arti “pemimpin umat”. Imam dalam hal ini sering disepadangkan dengan Khalifah. Hanya saja imam dipergunakan oleh kalangan Syi’ah, sedangkan khalifah oleh Sunni. Oleh karena itu, golongan Syi’ah menamakan kepemimpinan mereka dengan imamah, sedangkan Sunni menggunakan khalifah.⁴⁷

Pemakaian konsep Imamah khususnya di kalangan Syi’ah secara evolutif telah mengalami perkembangan makna. Di sini imamah yang berarti sama dengan khalifah sebagai konsep politik. Namun, dalam perkembangannya kemudian imamah

⁴⁷Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 120.

diberi muatan ideologis dan teologis sehingga tidak murni lagi sebagai konsep politik, melainkan berkembang menjadi pemimpin spiritual yang mempunyai makna sakral.

Defenisi lain Imamah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa Imamah adalah pengganti Nabi di dalam menegakkan agama.⁴⁸

Dari defenisi tersebut ada beberapa hal yang dapat menjadi catatan, yaitu: para ulama ahlusunnah menyamakan pengertian Imamah dengan khalifah dan mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama ketimbang persoalan duniawi. Hal inilah yang diperlukan untuk membedakan antara Imamah dan khilafah.

E. Teori Politik Imamah

Pemakaian konsep Imamah secara evolutif telah mengalami perkembangan makna. Di sini imamah yang berarti sama dengan khalifah sebagai konsep politik. Namun, dalam perkembangannya kemudian imamah diberi muatan ideologis dan teologis sehingga tidak murni lagi sebagai konsep politik, melainkan berkembang menjadi pemimpin spiritual yang mempunyai makna sakral.

Defenisi lain Imamah adalah Negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa Imamah adalah pengganti Nabi di dalam menegakkan agama.

Sejarah mencatat, bahwa hari-hari pertama setelah wafatnya Nabi saw, persoalan yang timbul adalah persoalan kekuasaan, yaitu menyangkut sosok figur yang dianggap paling pantas menggantikan kepemimpinan Nabi saw. Meskipun masalah itu untuk sementara waktu berhasil diselesaikan dengan diangkatnya Abu

⁴⁸Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 57.

Bakar sebagai khalifah, akan tetapi hal itu oleh sebagian kelompok dipandang masih menyisakan agenda persoalan.

Reaksi keras segera dimunculkan oleh para pendukung Ali yang mengklaim bahwa masalah kepemimpinan adalah hak mutlak Ali dan keturunannya atau Ahlul Bait, yang diyakini para pendukungnya dimana Ali telah menerima wasiat pengangkatan langsung dari Nabi saw. Wasiat ini diberikan sekitar 80 hari sebelum Nabi saw meninggal, di suatu tempat yang bernama Ghadir Khum.

Tetapi dalam kenyataannya, Ali justru baru memegang tampuk kepemimpinan setelah sebelumnya secara bergantian dipegang oleh Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ustman bin Affan. Oleh karena adanya keyakinan bahwa Ali telah menerima wasiat dari Nabi, dan oleh karena itu tentu ia yang paling berhak menggantikan Nabi setelah wafatnya beliau.⁴⁹

Yang dimaksud Imamah menurut al-Mawardi adalah "suatu lembaga kepala negara dan pemerintahan yang diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur dunia." Kepemimpinan dalam konteks ini dianggap sebagai pewaris sah pelanjut kepemimpinan nabi saw setelah beliau wafat. Menurut Ali Syariati Imamah adalah kepemimpinan progresif dan revolusioner yang berbeda dengan rezim-rezim lainnya guna membimbing manusia serta membangun masyarakat di atas fondasi yang benar dan kuat, yang bakal mengarahkan manusia menuju kesadaran, pertumbuhan dan kemandirian dalam mengambil keputusan.⁵⁰

Di dalam paham Syi'ah, imamah (kepemimpinan) memiliki makna yang lebih khusus, karena di dalamnya kepemimpinan dibatasi hanya sebagai hak mutlak Ahlul

⁴⁹Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni-Syi'ah* (Bandung: Pustaka, 1988), hal. 7.

⁵⁰Ali Syari'ati, *Islam Mazhab Aksi dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1992), h. 65.

Bait, yaitu Ali dan keturunannya. Dengan batasan semacam itu, maka model kepemimpinan dalam imamah didasarkan pada sistem "penunjukan" nabi saw kepada Ali dan turun-menurun oleh keturunannya.

Dalam argumentasi kaum Syi'ah, masalah imamah merupakan masalah yang sangat penting, sehingga tidak mungkin hanya diserahkan kepada umat untuk memutuskannya, melainkan harus melibatkan seorang manusia yang memiliki kualitas lebih untuk memutuskannya. Di sinilah peran aktif Nabi saw yang menunjuk Ali sebagai penggantinya dipandang sebagai suatu langkah rasional.

Tak masuk akal, demikian kata Tabataba'i, bahwa Nabi saw meninggal tanpa mengangkat seorang pengganti, padahal setiap Nabi saw berhalangan untuk memimpin suatu urusan, Nabi saw selalu mengangkat wakil, seperti dalam ekspedisi perang dan sebagainya, dan bahkan ketika Nabi saw berhalangan untuk memimpin shalat, Nabi juga menunjuk salah satu sahabat untuk menggantikannya.⁵¹

Atas dasar itu Tabataba'i mempertanyakan, "mungkinkah dalam urusan yang begitu penting (kepemimpinan), nabi saw membiarkannya dan menyerahkan urusan di tangan umat?" Pertanyaan ini menyiratkan adanya suatu formulasi sistematis yang dilakukan secara sadar mengenai tatanan sosial-politik di mana masyarakat tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan seorang pemimpin dan menghapus sama sekali peran aktif mereka di dalamnya, dengan suatu argumen bahwa inspirasi Ilahiah yang disalurkan melalui suara nabi saw akan menjadikan peran dan keputusan yang mereka ambil mubadzir.⁵²

⁵¹ Sayid Husein Tabataba'i, *Inilah Islam* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), h. 94.

⁵² Fauzi M. Najjar, *Demokrasi dalam Filsafat Politik Islam* (Al-Hikmah, 1990), h. 94.

Alasan yang seringkali digunakan adalah bahwa masalah kepemimpinan umat adalah masalah yang terlalu vital untuk diserahkan begitu saja pada musyawarah manusia-manusia biasa yang bisa saja memilih orang yang salah untuk kedudukan tersebut. Hanya Allah-lah yang bisa mengenali individu-individu yang memiliki sifat-sifat berilmu, tidak cacat dan tidak mungkin keliru (*ma'shum*), dan dengan demikian dapat menjamin kajayaan wahyu-wahyu-Nya dengan menjadikan individu-individu tersebut dikenal melalui nabi saw.⁵³

Ali Syari'ati, seorang cendekiawan yang sering disebut-sebut sebagai salah seorang "arsitek" revolusi Islam Iran tahun 1979, menyatakan bahwa tugas seorang imam di sini jauh lebih penting daripada bentuk kepemimpinan apa pun. Menurutny, imamah pada dasarnya merupakan perwujudan dari risalah kepemimpinan dan bimbingan individu dan masyarakat dari apa yang kini ada (*dassein*) menuju apa yang seharusnya ada (*dassolen*) semaksimal apa yang bisa dilakukan, bukan berdasarkan pada keinginan pribadi seorang imam, melainkan atas konsep yang baku yang menjadi kewajiban bagi imam lebih dari individu lainnya.⁵⁴

Dengan kata lain, tugas seorang imam tidak hanya terbatas pada memimpin umat manusia dalam salah satu aspek politik, kemasyarakatan dan perekonomian, juga tidak terbatas pada masalah-masalah tertentu seperti tugas-tugas seorang *amir* atau *khalifah*, tetapi tugasnya adalah menyampaikan kepada umat manusia semua aspek kehidupan yang bermacam-macam. Jadi sifatnya sangat multidimensional.

konsep *Wilayat al-Faqih* yang berkembang di pemerintahan Iran modern sekarang ini pada dasarnya adalah persambungan dari konsep imamah. Dilihat dari

⁵³ Hamid Enayat, *Reaksi Politik* (Jakarta: Nur Al-Huda, 2012) hal. 7.

⁵⁴ Ali Syari'ati, *Ummah dan Imamah*, terj. Afif Muhammad (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1995), h. 83.

garis besarnya, bentuk kekuasaan (kepemimpinan) Imamiyah dibagi ke dalam tiga periode. Bentuk pertama adalah kepemimpinan ketika para imam masih hidup. Bentuk kedua adalah ketika imam al-Mahdi (imam yang terakhir) dalam keadaan "gaib kecil". Bentuk ketiga adalah kepemimpinan ketika Imam al-Mahdi dalam keadaan "gaib besar" atau "gaib sempurna".

Dalam kepemimpinan bentuk pertama, adalah doktrin keagamaan yang diyakini oleh kaum Syi'ah bahwa nabi saw telah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Pengangkatan ini dikemukakan oleh nabi di suatu tempat yang bernama Ghadir Khum, yaitu ketika nabi saw bersama kaum Muslimin sedang dalam perjalanan pulang dari Haji Wada' (Haji Perpisahan). Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah, 81 hari sebelum wafatnya Nabi.

Syi'ah menyakini bahwa sepeninggal wafatnya beliau, maka yang berhak menggantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin kaum Muslimin adalah Ali dan berturut-turut dilanjutkan sebelas keturunannya.

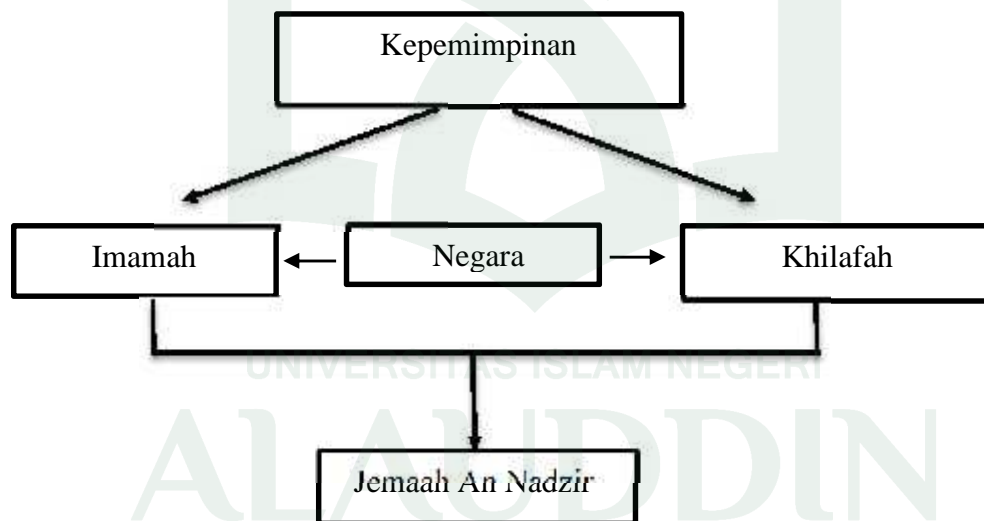
Bentuk kepemimpinan yang ketiga adalah ketika Imam al-Mahdi dalam keadaan "gaib besar", yakni ketika keempat wakil Imam di atas sudah wafat, sampai kedatangan kembali Imam al-Mahdi. Pada masa "kegaiban besar" inilah kepemimpinan dipegang oleh para faqih (ulama ahli hukum).

Inilah yang dimaksudkan dengan *Wilayat al-Faqih* atau kekuasaan dipegang oleh para faqih. Di dalam sistem *Wilayat al-Faqih* ini, kaum faqih atau ulama memegang peran penting dalam pemerintahan Islam, dengan satu alasan bahwa hanya kaum ulama sajalah yang dipandang dapat dipercaya dan memiliki kualifikasi, baik dilihat dari sisi integritas moral maupun dalam menjalankan tugas-tugas keagamaan dan kemasyarakatan. Dengan kualifikasi-kualifikasi yang dimiliki seperti itu, maka

diyakini hukum-hukum Tuhan akan dapat direalisasikan dengan baik dan kemurnian wahyu-wahyu-Nya juga bisa dijaga dengan baik pula.

F. Kerangka Konseptual

Dalam konsep kepemimpinan islam dikenal 2 aliran pemikiran yaitu konsep kepemimpinan Imamah dan Khilafah yang pada akhirnya melahirkan konsep tentang negara Islam. Dalam memahami konsep negara dan kepemimpinan Imamah maka saya sebagai penulis mencoba untuk Meneliti Jemaah An Nadzir yang berada di Kabupaten Gowa Kecamatan Somba Opu, Jemaah ini adalah salah satu contoh kelompok yang menerapkan kepemimpinan Imamah.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Selain itu, juga menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Adapun lokasi penelitian adalah daerah Mawang Kec. Somba Opu Kab. Gowa karena tempat tersebut dijadikan tempat bermukim Jemaah An Nadzir.

B. *Pendekatan Penelitian*

a. Pendekatan Syar'i

Pendekatan syar'i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syariah terkhusus fiqh Islam yang terkait dengan konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An-Nadzir yang dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan.

b. Yuridis Empiris

Yuridis empiris yaitu pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan berdasarkan data kepustakaan melalui *library research* yang terkait dengan konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An Nadzir yang dapat dijadikan sebagai acuan pembahasan.

C. *Sumber Data*

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun sumber data yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara-cara seperti *interview* yaitu berarti kegiatan terjun langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An-Nadzir dan didukung oleh data-data kuantitatif.

Adapun sumber data primer ini jumlahnya 5 orang *informan*. Dari 5 orang tersebut terdiri dari Pimpinan Jemaah An Nadzir, dan Jemaah An Nadzir 3 orang, dan 1 orang mantan Jemaah An Nadzir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel I
Tentang *Informan*

NO	NAMA	INFORMAN	KET
1	Pimpinan Jemaah An Nadzir	1 orang	
2	Jemaah An Nadzir	3 orang	
3	Mantan Jemaah An Nadzir	1 orang	
JUMLAH		5 orang	

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah teknik untuk mencari bahan-bahan atau data-data yang bersifat sekunder yaitu data yang erat hubungannya dengan bahan primer dan dapat dipakai untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui *Library research* dengan jalan menelaah buku-buku dan publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Metode ini menggunakan dua kutipan sebagai berikut:

a. Kutipan Langsung

Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya.

b. Kutipan Tidak Langsung

Penulis mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan ke dalam susunan redaksi yang baru, tanpa sedikitpun merubah susunan redaksinya, mengutip pendapat orang lain dengan cara meringkasnya tetapi inti dari pendapat tersebut tetap sama.

5 *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan informan, sama seperti penggunaan

daftar pertanyaan.¹ Oleh karena itu peneliti menggunakan metode ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen bisa berbentuk tulisan (peraturan dan keputusan), gambar atau karya-karya yang momental yang bersangkutan dengan penelitian ini.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.² Penggunaan metode observasi dalam penelitian di atas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang dilakukan secara langsung dengan mengamati objek. Penulis menggunakan teknik ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan, alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis. Pada observasi ini penulis akan menggunakannya dengan maksud untuk mendapatkan data yang efektif mengenai konsep negara dan kepemimpinan Imamah menurut Jemaah An-Nadzir.

d. Studi Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur-literatur mengenai hukum Islam,

¹Moebar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2002), h. 143.

²Husaini Usman Poernomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.54.

internet, serta semua bahan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya.

6 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat pengumpulan data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian.³ Instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan peneliti yang selanjutnya terjun kelapangan. Adapun alat-alat yang harus disiapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut:

a. Pedoman wawancara

Pedoman Wawancara adalah alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.

b. Buku catatan dan pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

c. Kamera

Kamera yaitu alat berfungsi untuk memotret jika peneliti sedang melakukan pembicaraan dengan informan.

³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian* (Makassar: Alauddin Press, 2013), h.17.

7 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Pengelolaan data secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. *Editing* data

Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui *relevansi* (hubungan) dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan-raguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

2. *Coding* data

Coding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pangkal pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

8 *Pengujian Keabsahan Data*

Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian. suatu penelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat memperoleh kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian bila telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji keabsahan data penelitiannya.

Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian, dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.⁴ Tetapi triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi sumber data penelitian.

⁴Lexy J.Moleon, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 178.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Jemaah An Nadzir berkumpul di Desa Mawang (Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan), atau tepatnya di pinggir Danau Mawang. Di tempat itu sebenarnya memang telah ada beberapa orang Jemaah An Nadzir yang diorganisir oleh Almarhum Daeng Rangka (pimpinan An Nadzir yang sering disebut sebagai panglima). Di desa ini, mereka melaksanakan aktivitas mereka dengan aman dan nyaman.

Menurut ustadz Lukan Anggota Jemaah An Nadzir dapat dimasukkan dalam dua kategori besar, yaitu Jemaah mukim dan Jemaah non-mukim.

Jemaah mukim adalah Jemaah yang telah menetap di sekitar Danau Mawang dan sekitarnya. Jemaah mukim yang telah berkeluarga dan kaum perempuannya ditempatkan di pinggir lereng bukit, Kampung Batua (masih wilayah Desa Mawang), sedangkan kaum laki-laki yang belum berkeluarga biasanya tinggal di pusat kampung, atau di pondok dan di tempat usaha komunitas An Nadzir. Jemaah mukim ini diharuskan memanjangkan rambut sebauh dan mengecat pirang serta memakai pakaian jubah berwarna hitam sebagai identitas utama komunitas An Nadzir. Bahkan anak lelaki mereka dibiasakan pula untuk memanjangkan rambut dan mengecat pirang sebagaimana layaknya pria dewasa. Mengecat dan memanjangkan rambut menurut Jemaah An Nadzir merupakan sunnah Nabi Muhammad saw.

Sedangkan Jemaah non-mukim, adalah pengikut An Nadzir yang tinggal di luar Desa Mawang. Mereka kebanyakan berasal dari Kota Gowa, dan Makassar. Jemaah non-mukim berasal dari berbagai latar profesi di perkotaan. Mereka biasanya

datang tiap Hari Jumat untuk melaksanakan Shalat Jumat dan mendengarkan tausyiah agama dan zikir dari amir (pimpinan) Jemaah yang saat ini diperankan oleh ustadz Lukman. Jemaah non mukim tidak diharuskan memanjangkan rambut dan menggunakan jubah sebagai pakaian sehari-hari seperti anggota Jemaah yang mukim.

Penampilan mereka tidak berbeda dengan kebanyakan masyarakat. Hanya saja pada saat mengikuti pengajian atau tausyiah dan zikir, mereka diharuskan menggunakan pakaian jubah khas komunitas An Nadzir (lihat Lampiran).

Wilayah kerja An Nadzir terbagi dua; pondok dan markaz. Wilayah pondok adalah tempat tinggal sebagian besar anggota Jemaah khususnya yang telah berkeluarga dan para anggota jemaah perempuan. Wilayah pondok berada di sebelah utara dekat perbukitan (kampung Batua dan sekitarnya). Luas wilayah yang dijadikan sebagai pondok atau pemukiman sekitar 10 ha. Sedangkan markas adalah pusat aktivitas sosial keagamaan komunitas.

Wilayah yang disebut markas adalah pinggir danau Mawang, di sana terdapat dua tempat utama yaitu langgar dan rumah kayu. Langgar tempat Kajian dan tempat untuk merancang kegiatan komunitas selanjutnya. Sedangkan rumah kecil yang berjarak sekitar 20 meter dari langgar dijadikan tempat menerima tamu.

B. *Konsep Negara Menurut Jemaah An Nadzir*

Negara menurut Jemaah An Nadzir berdasarkan wawancara dengan ustadz Lukman dibentuk untuk melindungi hak warga negaranya karena hukum yang ada didalamnya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hadirnya negara adalah sebagai alat untuk memaksakan masyarakat untuk mematuhi hukum karena tanpa adanya negara maka masyarakat tidak ingin

mematuhi hukum. Dalam hukum Islam, tanpa kehadiran negara sekalipun setiap pemeluk ajaran tersebut pasti akan tunduk dan patuh terhadap segala aturan yang telah ditetapkan dan tidak membutuhkan negara sebagai pemegang kewenangan untuk memaksakan bahkan menggunakan kekerasan agar hukum dapat dipatuhi.¹

An Nadzir memahami bahwa kepemimpinan yang diwariskan oleh Nabi hanya memiliki syarat Jemaah, Imam, Baiat, dan Taat, sehingga tidak mengharuskan adanya batas wilayah dalam kepemimpinan tersebut. Negara adalah sesuatu yang tidak dilakukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw, sebagaimana Nabi Muhammad saw menerapkan suatu sistem kepemimpinan yang bertujuan untuk menegakkan hukum Allah tanpa adanya batas wilayah kekuasaan. Khilafah dalam kepemimpinan Imamah merupakan suatu hal yang wajib untuk tegaknya hukum Allah di muka bumi ini. Berbagai macam konsep negara yang hadir sepeninggalan Nabi hingga saat tidak dapat mempertahankan eksistensinya.²

Jemaah An Nadzir berpendapat bahwa tidak ada negara Islam karena Islam adalah rahmat bagi alam semesta dan bukan hanya untuk untuk bangsa tertentu maupun daerah tertentu. Perjanjian Madinah dan perjanjian Sinai hanya merupakan sebuah perjanjian damai dan tidak memenuhi syarat berdirinya sebuah Negara.³

Negara khilafah tidak akan dapat terbentuk karena pendirian negara khilafah penuh dengan nafsu kekuasaan. Dalam pandangan Jemaah An Nadzir khilafah adalah dimanapun tegak hukum Allah dan Sunnah Nabi walaupun hanya di sejengkal tanah, tentu dengan memiliki pemimpin.⁴

¹Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017.

²Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

³Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

⁴Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

Khilafah tentu memiliki pemimpin tapi dalam pespektif Jemaah An Nadzir pemimpin yang dimaksud adalah Imam yang sudah merupakan ketentuan Allah di muka bumi ini dan tidak dapat diganggu gugat. Khilafah merupakan sebuah keharusan dan awal hukum merupakan Khilafah.⁵

C. *Konsep Kepemimpinan Imamah Menurut Jemaah An Nadzir*

Imamah merupakan konsep kepemimpinan berdasarkan peristiwa Ghadir khum dimana Nabi menunjuk Imam Ali sebagai pemimpin setelahnya. Imam dalam konsep Imamah adalah orang-orang pilihan dari kalangan Ahlul Bait dan keturunannya yaitu Fatimah, Ali, Hasan, Husein dan keturunannya hingga sampai kepada Imam Mahdi.

Dalam konsep kepemimpinan, Jemaah An Nadzir menganut sistem Imamah. Setelah Imam Besar An Nadzir, KH Syamsuri Abdul Madjid, meninggal dunia, Kepemimpinan An Nadzir hingga kini dilanjutkan oleh panglima-panglima beliau, dan salah satunya adalah Lukman yang sejak awal bermukim di Danau Mawang.

Menurut An Nadzir kepemimpinan setelah periode kenabian yang ada hanyalah para Imam berdasarkan peristiwa Ghadir Khum dimana Nabi menunjuk Ali sebagai Imam setelahnya. Namun khilafah ternodai dengan peristiwa setelahnya. Khilafah merupakan Ketentuan Allah dan bukan ciptaan manusia.⁶

Di akhir zaman hanya ada satu tokoh yang dapat memimpin manusia dan kembali menegakkan hukum Allah dan Sunnah Nabi yaitu Imam Mahdi as. Jemaah

⁵Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

⁶Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

An Nadzir berpendapat bahwa saat ini mereka hanya fokus untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun rohani untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi as.⁷

Sistem imamah dalam konteks pemahaman An Nadzir adalah kepemimpinan spiritual dari seorang imam yang dianggap sebagai orang yang dapat menjamin kebenaran bagi para pengikutnya. Oleh karena itu kapasitas personal menjadi indikator utama dalam pergantian kepemimpinan, bukan prosedur formal sebagaimana layaknya organisasi modern. An Nadzir menerapkan lima kriteria utama seseorang layak menjadi imam, yaitu:

1. Dia mengenal Allah sehingga syahadatnya benar.
2. Dia mempunyai wawasan yang luas.
3. Dia seorang pemberani sehingga berani mengatakan kebenaran dalam semua situasi.
4. Dia memiliki kekuatan baik fisik maupun rohani
5. Memiliki kebijaksanaan.

Selain kelima syarat itu, An Nadzir juga mensyaratkan imam sebagai bagian dari ulama yang mengamalkan amalan-amalan Nabi Muhammad dan menjadi saksi terhadap amalan-amalan tersebut. Saat ini, imam besar An Nadzir masih dipegang Syamsuri Madjid yang telah di baiat oleh Jemaah An Nadzir, belum ada penetapan pengganti karena belum ada yang dianggap memenuhi kelima syarat tersebut, jadi Jemaah An Nadzir menantikan datangnya Imam Mahdi dan untuk mengisi kekosongan tersebut maka segala keputusan dipegang oleh perwakilan Jemaah An Nadzir yang sempat dipegang oleh panglima An Nadzir Almarhum Daeng Rangka dan saat ini dipegang oleh Ustad Lukman sebagai perwakilan Jemaah An Nadzir.

⁷Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

Jemaah An Nadzir meyakini bahwa sepeninggalan Nabi maka pemimpin selanjutnya adalah Imam Ali dan seterusnya hingga Imam Mahdi. Nabi telah mewariskan sebuah sistem kepemimpinan dan telah mengangkat pemimpin sepeninggalannya.⁸

Pengetatan persyaratan menjadi imam tidak terlepas dari peran dan fungsi imam yang sangat penting dalam struktur spiritual komunitas An Nadzir. Imam memiliki tugas untuk menggaransi terhadap keseluruhan praktik keagamaan komunitas sebagai sesuatu yang benar dan tidak dapat diragukan. Sehingga para hamba atau jemaah benar-benar yakin bahwa pemahaman dan praktik keagamaan mereka telah berada di jalur kebenaran.⁹

Komunitas An Nadzir memahami bahwa baiat merupakan tali penghubung mereka dengan Allah melalui jaminan atau garansi dari sang Imam. Sang Imam telah menggaransi bahwa apa yang telah diajarkan oleh beliau adalah kebenaran. Komunitas An Nadzir meyakini bahwa baiat merupakan dasar utama menjadi seorang Muslim. Tanpa baiat, seseorang tidak dapat menjalankan ibadah dengan keyakinan penuh.¹⁰

Baiat memberikan rasa aman dan menjadi dasar untuk meyakini bahwa apa yang telah diajarkan oleh Imam adalah sebuah kebenaran. Oleh karena tidak mungkin Imam memberi jaminan atau garansi jika ia sendiri tidak meyakini kebenaran tersebut. Faktor inilah yang membuat komunitas An Nadzir memiliki fondasi keyakinan yang sangat kuat.¹¹

⁸Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

⁹Zaid Buri Indiardjo, *Wawancara mantan Jemaah An Nadzir*, 18 Juni 2017

¹⁰Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

¹¹Zaid Buri Indiardjo, *Wawancara mantan Jemaah An Nadzir*, 18 Juni 2017

Menurut Jemaah An Nadzir Imamah tidak akan pernah terputus sejak diwariskan oleh Nabi kepada Imam Ali, lalu kepada Imam Hasan, kemudian kepada Imam Hussein dan seterusnya hingga sampai kepada Imam Mahdi.¹²

Ada tiga periode Imamah. Bentuk pertama adalah kepemimpinan ketika para imam masih hidup. Bentuk kedua adalah ketika imam al-Mahdi (imam yang terakhir) dalam keadaan "gaib kecil". Bentuk ketiga adalah kepemimpinan ketika Imam al-Mahdi dalam keadaan "gaib besar" atau "gaib sempurna."¹³

Dalam kepemimpinan bentuk pertama, adalah ketika Nabi saw telah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Pengangkatan ini dikemukakan oleh Nabi di suatu tempat yang bernama Ghadir Khum, yaitu ketika Nabi saw bersama kaum Muslimin sedang dalam perjalanan pulang dari Haji Wada' (Haji Perpisahan). Peristiwa ini terjadi pada tanggal 28 Zulhijjah tahun 10 Hijriyah, 81 hari sebelum wafatnya Nabi. Sepeninggal wafatnya beliau, maka yang berhak menggantikan kedudukan beliau sebagai pemimpin kaum Muslimin adalah Ali dan berturut-turut dilanjutkan keturunannya.¹⁴

Periode kedua adalah ketika Imam al-Mahdi dalam keadaan "gaib kecil". Pada masa ini, kepemimpinan umat Islam dipegang oleh empat orang wakil.

Periode yang ketiga adalah ketika Imam al-Mahdi dalam keadaan "gaib besar, sampai kedatangan kembali Imam al-Mahdi. Pada masa "kegaiban besar".¹⁵

Menurut An Nadzir Khilafah Islamiyah mutlak dan menjadi ketentuan Allah melalui Imam Mahdi as. Khilafah akan tegak sesuai ketentuan Allah. Di masa

¹²Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

¹³Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

¹⁴Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

¹⁵Zaid Buri Indiardjo, *Wawancara mantan Jemaah An Nadzir*, 18 Juni 2017

kepemimpinan Imam Mahdi, An Nadzir meyakini dunia akan dipenuhi oleh kebaikan sebagaimana sebelumnya dunia dipenuhi kebatilan.¹⁶

An Nadzir meyakini kapasitas al Mahdi adalah kapasitas seluruh Nabi dan Rasul karena permasalahan dunia saat ini meliputi seluruh masalah yang muncul baik masa Nabi Adam maupun Masa Nabi al Mustafa saw, orang membunuh saudaranya sendiri, orang mempertuhankan manusia, orang menyembah benda mati, hubungan sesama jenis, hingga orang tua membunuh anak sendiri. Oleh karenanya maka kemunculan al Mahdi menjadi sangat dinantikan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi umat manusia.¹⁷

An Nadzir meyakini setelah kemunculannya, al Mahdi akan memulai perjalanannya menebarkan kebenaran mulai dari timur yang menurut analisis mereka tempat tersebut adalah Gowa. Hal ini didasari pada keyakinan kemiripan keadaan masyarakat di Mekkah ketika kemunculan Nabi saw dengan keadaan masyarakat Gowa. Juga pernyataan Nabi saw bahwa al Mahdi akan memulai perjalanannya dari timur ke barat. Menurut Jemaah An Nadzir, jika peta bumi ini diluruskan kemudian dibagi menjadi dua, maka ujung paling kanan adalah kabupaten Gowa.¹⁸

Dalam perjalanannya Imam Mahdi akan didampingi oleh 313 orang dengan kapasitas syuhada perang badar dan untuk itulah maka Jemaah An Nadzir mempersiapkan diri mereka sehingga layak menerima kapasitas syuhada perang badar tersebut.¹⁹

¹⁶Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

¹⁷Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

¹⁸Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

¹⁹Zaid Buri Indiardjo, *Wawancara mantan Jemaah An Nadzir*, 18 Juni 2017

Imam Mahdi diyakini oleh An Nadzir akan muncul di depan Ka'bah, Nabi Isa juga akan turun untuk kemudian berbaiat kepada imam Mahdi, disertai malaikat jibril yang membawa pedang Zulfikar untuk diserahkan kepada Imam Mahdi sebagai otentikasi Tuhan atas keaslian imam Mahdi dan Nabi Isa.²⁰

Dari mekkah kemudian imam Mahdi, Nabi Isa, dan 313 pengikutnya akan menuju ke Gowa, menerima perintah penegakan hukum Islam di muka bumi ini, kemudian mendeklarasiakannya.²¹

Dalam penegakan Khilafah Islamiyah, An Nadzir meyakini permusuhan akan datang dari utara dan selatan dibawah pimpinan Dajjal, namun demikian tegaknya hukum Islam di bumi akan tetap berlangsung selama 40 masa sebelum akhirnya dunia kembali dipenuhi kebatilan dan kiamat pun terjadi atas kehendak Tuhan.²²

Dalam pemahaman An Nadzir hukum Islam akan tegak pada diri pribadi orang per orang, setiap orang akan dengan ikhlas menegakkan hukum Islam pada dirinya, sehingga setiap orang akan selamat dan membawa keselamatan pada sekitarnya baik pada sesama manusia ataupun terhadap hewan, tumbuhan, bahkan kepada makhluk dari dimesi lain seperti Jin dan sebagainya.²³

Dengan tegaknya hukum Islam pada setiap pribadi, maka penegakan hukum tersebut berlaku universal dan diberlakukan universal oleh setiap pribadi, meliputi segala hal dan meliputi semua permasalahan yang ada.²⁴

²⁰Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

²¹Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

²²Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

²³Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

²⁴Lukman Bakti, *Wawancara pimpinan Jemaah An Nadzir*, 16 Juni 2017

Karena rumitnya masalah dan perbedaan masalah bagi setiap individu maka dibutuhkan peranan Imam, dalam hal ini al Mahdi, untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh manusia.

An Nadzir meyakini pada masa Al Mahdi seluruh manusia akan ridho dengan ketetapan Tuhan, dan hukum Islam akan tegak pada setiap pribadi dengan keikhlasan masing-masing. Dengan demikian maka setiap manusia akan menjadi pribadi mulia dan membawa rahmat Tuhan bagi segala sesuatu dimuka bumi ini.²⁵



²⁵Zaid Buri Indiardjo, *Wawancara mantan Jemaah An Nadzir*, 18 Juni 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai konsep negara dan kepemimpinan imamah menurut Jemaah An Nadzir, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Negara menurut Jemaah An Nadzir dibentuk untuk melindungi hak warga negaranya karena hukum yang ada didalamnya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Hadirnya negara adalah sebagai alat untuk memaksakan masyarakat untuk mematuhi hukum karena tanpa adanya negara maka masyarakat tidak ingin mematuhi hukum. Dalam hukum Islam, tanpa kehadiran negara sekalipun setiap pemeluk ajaran tersebut pasti akan tunduk dan patuh terhadap segala aturan yang telah ditetapkan dan tidak membutuhkan negara sebagai pemegang kewenangan untuk memaksakan bahkan menggunakan kekerasan agar hukum dapat dipatuhi.
2. Sistem imamah dalam konteks pemahaman An Nadzir adalah kepemimpinan spiritual dari seorang imam yang dianggap sebagai orang yang dapat menjamin kebenaran bagi para pengikutnya. Oleh karena itu kapasitas personal menjadi indikator utama dalam pergantian kepemimpinan, bukan prosedur formal sebagaimana layaknya organisasi modern. An Nadzir menerapkan lima kriteria utama seseorang layak menjadi imam, yaitu:
 - (1) Dia mengenal Allah sehingga syahadatnya benar.
 - (2) Dia mempunyai wawasan yang luas.

- (3) Dia seorang pemberani sehingga berani mengatakan kebenaran dalam semua situasi.
- (4) Dia memiliki kekuatan baik fisik maupun rohani
- (5) Memiliki kebijaksanaan.

B. *Implikasi Penelitian*

Bertolak dari kesimpulan di atas maka dapat dirumuskan saran-saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu:

1. Seharusnya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Jemaah An Nadzir karena sumbangan pemikiran yang akhirnya memperkaya khazanah pengetahuan Islam di Indonesia.
2. Seharusnya masyarakat dapat menerima adanya perbedaan pemikiran pada suatu kalangan minoritas dikarenakan kebenaran itu bukan tentang siapa yang berbicara akan tetapi apa yang dibicarakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, Oksep. *Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam* Vol. 1, No. 1, 2011, fisip.umrah.ac.id/.../JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last_86_1... (Diakses 24 februari 2017, pukul 11.47 Wita).
- Agus, Bustanuddin. *Islam dan Pembangunan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Al-Shadr, Muhammad Baqir. *Khilafah dan Imamah*, Jakarta: Nur Al-Huda, 2012.
- Asmara, Usna. *Pengantar Kepemimpinan kependidikan*, Cet II; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Askara, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Enayat, Hamid. *Reaksi Politik Sunni-Syi'ah*, Bandung: Pustaka, 1988.
- Hartono, Yudi. *Agama dan Relasi sosial*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2002.
- Imani, Allamah Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur'an*, Jilid 4, A-Huda.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*, Cet I; Jakarta: Rader Jaya Pratama, 2001.
- Jafar, Usman. *Islam dan Politik Dinamika Pemikiran Politik dalam Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Islam*, Malang: Setara Press, 2016.
- Jurdi, Syarifuddin. *Politik Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Karim, Syahrir. *Politik Islam I*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ar-Raafi', 2012.
- Mahmuddin. *Ideologi Kajian Islamisme*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara*, Cet II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Moleon, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Nata, Abuddin. *Masail Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Najjar, Fauzi M. *Demokrasi dalam Filsafat Politik Islam*, A-Hikma, 1990.
- Nazaruddin. *Pemikiran Islam dan Negara*, Palu: STAIN Datokaramo, 2006.
- Poernomo, Husaini Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah Ajaran, sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
- Purwanto, Nalim. *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Mutiara, 1984.
- Rahman, Afzarul. *Nabi Muhammad Sebagai Pemimpin Militer*, Jakarta: Amzah, 2006.

- Rajab, Syamsuddin. *Syariat Islam dalam Negara Hukum* Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Sjadzali, Muhammad Munawwir. *Islam dan Tata Negara*, Penerbit Universitas Indonesia: UI press, 1993.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam*, Jakarta: TERAJU, 2002.
- Syari'ati, Ali. *Islam Mazhab Aksi dan Pemikiran*, Bandung: Mizan, 1992.
- Tabataba'i, Sayid Husein. *Inilah Islam*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Tim Ahlulbait Indonesia. *Syiah Menurut Syiah*, Jakarta Selatan: Dewan Pengurus Pusat Ahlulbait Indonesia, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah: Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian*, Makassar: Alauddin Press, 2013.
- Yakub, Hamzah. *Tekhnik Dakwah dan Leadership*, Bandung: Diponegoro, 1981.
- Yasid, Abu. *Fikih Politik*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Zainuddin, Mahdi. *Studi Kepemimpinan Islam*, Yogyakarta: Al-Muhsin, 2002.
- Zuhri. *Sejarah Politik Islam*, Yogyakarta: Tarjih, 2002.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ahmad Maulana, lahir di Ujung Pandang Kec. Panakukkang Kota Makassar pada tanggal 26 Mei 1995 dari pasangan suami istri **Zaid Buri Indiardjo** dan **Santy Guricci** yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memulai pendidikannya pada tingkat sekolah dasar di SD Negeri Inpres Tello Baru pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN Negeri 23 Makassar pada tahun 2007 dan selesai pada tahun 2010. Adapun pengalaman organisasi yaitu pernah menjadi pengurus Sanggar Seni. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 Makassar pada tahun 2010 dan tamat pada tahun 2013. Adapun pengalaman organisasi yaitu menjadi pengurus Taekwondo, pengurus Remaja Mesjid, Pengurus English Club, dan pengurus Sanggar Seni. Kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat universitas di UIN Alauddin Makassar, jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Pernah menjadi pengurus HMJ periode 2014-2015 dan Pengurus DEMA periode 2015-2016 sampai 2016-2017, dan ketua Komunitas Kampung Hukum.

ALAUDDIN
M A K A S S A R

LAMPIRAN-LAMPIRAN



